

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP MUTU
PENDIDIKAN PADA STANDAR PROSES DI SEKOLAH
KEC. BUKIT RAYA (SMAN 14 KEL. SIMPANG TIGA
KEC. BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU).**

TESIS

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Pendidikan (M. Pd) Pada Perogram
Studi Pendidikan Agama Islam**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

MUHAMMAR NASUTION

21890115450

**PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1442 H/ 2021 M**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Muhammar Nasution
Nomor Induk Mahasiswa : 21890115450
Gelara Akademik : M.Pd. (Magister Pendidikan)
Judul : ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP MUTU
PENDIDIKAN PADA STANDAR PROSES DI SEKOLAH
KEC. BUKIT RAYA (SMAN 14 KEL. SIMPANG TIGA KEK.
BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU)

Tim Penguji:

Dr. Andi Murniati, M.Pd
Penguji I/Ketua

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si
Penguji II/Sekretaris

Dr. Sri Murhayati, M.Ag
Penguji III

Dr. Hj. Nurhasnawati, M.Pd.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

03/05/2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Pendidikan Pada Standar Proses Di Sekolah Kec. Bukit Raya (Sman 14 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru)”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Muhammar Nasution
NIM : 21890115450
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Telah diperbaiki sesuai saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 03 Mei 2021

Penguji I,

Dr. Sri Murhayati, M. Ag
NIP. 197401032000032001

.....
Tanggal, 03 Mei 2021

Penguji II,

Dr. Hj. Nurhasnawati, M.Pd
NIP. 196806021993032001

.....
Tanggal, 03 Mei 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam

Dr. Alwizar. S. Ag, M.Ag
NIP : 197004222003121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Pendidikan Pada Standar Proses Di Sekolah Kec. Bukit Raya (Sman 14 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru)”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Muhammar Nasution
NIM : 21890115450
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam

Telah diperbaiki sesuai saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 03 Mei 2021

Pembimbing I,

Dr. Zamsiswaya, M. Ag
NIP : 197001211997031003


Tanggal, 13 Agustus 2021

Pembimbing II,

Dr. Alwizar. S. Ag, M.Ag
NIP : 197004222003121002


Tanggal, 13 Agustus 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam


Dr. Alwizar. S. Ag, M.Ag
NIP : 197004222003121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul **“Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Pendidikan Pada Standar Proses Di Sekolah Kec. Bukit Raya (Sman 14 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru)”**


Nama	: Muhammar Nasution
NIM	: 21890115450
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam
Konsentrasi	: Pendidikan Agama Islam

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasih Riau

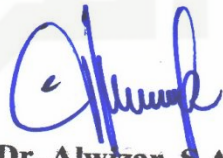
Tanggal : 10 Maret Januari 2021

Tanggal : 13 Maret 2021

Pembimbing I,


Dr. Zamsiswaya, M. Ag
NIP : 197001211997031003

Pembimbing II,


Dr. Alwizar. S. Ag, M. Ag
NIP : 197004222003121002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam


Dr. Alwizar. S. Ag, M. Ag
NIP : 197004222003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Zamsiswaya, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOTA DINAS

Prihal : Tesis Saudara Muhammar Nasution

Kepada Yth,
Derektur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Muhammar Nasution
NIM : 21890115450
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam
Judul : **Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Pendidikan Pada Standar Proses Di Sekolah Kec. Bukit Raya (Sman 14 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum wr wb

Pekanbaru, 2 Februari 2021
Pembimbing I


Dr. Zamsiswaya, M.Ag
NIP : 197001211997031003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Alwizar, S.Ag, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOTA DINAS

Prihal : Tesis Saudara Muhammar Nasution

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Muammar Nasution
NIM : 21890115450
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam
Judul : **Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Pendidikan Pada Standar Proses Di Sekolah Kec. Bukit Raya (Sman 14 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau

Wassalamu'alaikum wr wb

Pekanbaru, 15 Februari 2021
Pembimbing II

Dr. Alwizar, S.Ag, M.Ag
NIP : 197004222003121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammar Nasution
Nomor Induk Mahasiswa : 21890115450
Tempat/Tanggal Lahir : Pijorkoling , 23 Juni 1995
Program : Magister
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam (M.Pd)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun dengan judul : **“ANALISIS KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM ZONASI TERHADAP MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH KEC. BUKIT RAYA (SMAN 14 KEL. SIMPANG TIGA KEC. BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU).”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dari program pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau ini seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri maupun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh sebahagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 8 April 2021

Pernyataan

Muhammar



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Sepenuh tulus penulis panjatkan syukur kehadirat Allah SWT. Sang maha sempurna, penguasa alam semesta, pengijabah antara do'a dan cita-cita. Berkat keberkahan dan keridhoan-Nya peneliti ini dapat menulis selesaikan hingga dapat dipertahankan dewan penguji dalam sidang munaqasah.

Semoga Allah SWT mencurahkan shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW sang pembawa risalah, penuntun ummat dengan *uswah* dan *qudwah*, penebar rahmat untuk mencapai *hasanah* dunia akhirat.

Tesis ini disusun sebagai salah satu tugas akademis dalam rangka mencapai gelar Master Pendidikan Islam (M.Pd.I) dalam program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat keterlibatan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih atas perhatian, dorongan dan bantuan semua pihak yang telah menjadi motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dan bisa merampungkan perkuliahan. Dengan penuh ketulusan penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husni, MA. Sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah memberi kesempatan kepada penulis menempuh pendidikan pada lembaga yang dipimpinnya.

3. Ibu Dr. Alwizar S,Ag. M,Ag. Sebagai ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, yang telah memberi nasehat, arahan dan kemudahan akademika kepada penulis selama mengikuti perkuliahan dan penulisan tesis.
4. Bapak Dr. Zamsiswaya M.Ag sebagai Dosen pembimbing I yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan bantuan selama menjalani pendidikan sampai akhir perkuliahan.
5. Bapak Dr. Alwizar S,Ag. M,Ag. sebagai Dosen pembimbing II yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan bantuan selama menjalani pendidikan sampai akhir perkuliahan. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, informasi pemikiran, serta wawasan selama perkuliahan.
7. Penuh cinta sayang untuk Ayahanda Ali Hasan Nasution dan Ibunda Masnawati Siregar do'a dan perjuangan yang penuh ikhlas diberikan kepada ananda dalam menjalani proses kehidupan. Kakak Suryani Nst, Nur Aini Nst, Asrawati Nst, serta Adek M. Fauzi Nst dan Syariah Nst.
8. Kepala Sekolah SMA 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru yang telah memberikan kemudahan selama proses penelitian disekolah tersebut, mudah-mudahan proses yang dilewati menjadi bekal keberkahan di masa depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Tesis ini juga penulis persembahkan dengan penuh penghargaan atas perhatian teman-teman seangkatan atau sekelas, terutama kosma menjadi motivasi dalam proses penyelesaian yang saya lewati.
10. Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah menyediakan sumber referensi selama penulisan tesis.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu melalui penulisan ini, baik yang langsung terlibat maupun yang tidak penulis mengucapkan terimakasih.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi pijakan bagi perkembangan akademik penulis untuk melangkah pada tahap selanjutnya.

Penulis202....

MUHAMMAR NASUTION

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi yang digunakan dalam tulisan ini mengacu pada buku *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah* yang diterbitkan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	<i>alif</i>	A	ط	<i>ṭā'</i>	Th
ب	<i>bā'</i>	B	ظ	<i>ḍā'</i>	Zh
ت	<i>tā'</i>	T	ع	<i>'ain</i>	'
ث	<i>thā'</i>	TS	غ	<i>ghayn</i>	GH
ج	<i>jīm</i>	J	ف	<i>fā'</i>	F
ح	<i>ḥā'</i>	H	ق	<i>gāf</i>	Q
خ	<i>khā'</i>	KH	ك	<i>kāf</i>	K
د	<i>dāl</i>	D	ل	<i>lām</i>	L
ذ	<i>dhāl</i>	DZ	م	<i>mīm</i>	M
ر	<i>rā'</i>	R	ن	<i>nūn</i>	N
ز	<i>zā'</i>	Z	هـ	<i>hā'</i>	H
س	<i>sīn</i>	S	و	<i>wau</i>	W
ش	<i>shīn</i>	Sy	ء	<i>hamzah</i>	'
ص	<i>ṣād</i>	Sh	ي	<i>yā'</i>	Y
ض	<i>dlād</i>	DI			

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal dan Diftong

Setiap Penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “ a”, *kasrah* dengan “i”, *dhomeh* dengan “ u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a)	A	Misalnya	قال	Menjadi	qala	Panjang =
Vokal (i)	I	Misalnya	قيل	Menjadi	qila	Panjang =
Vokal (u)	U	Misalnya	دون	Menjadi	duna	Panjang =

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara difitog wawu dan ya’ setelah fatha ditulis dengan “aw” dan “ay” contoh sebagai berikut:

Diftong	او	Misalnya	قول	Menjadi	qawlun	(aw) =
Diftong	اي	Misalnya	خير	Menjadi	khayrun	(ay) =

C. Ta’marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya:

في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

Muhammar Nasution :

ABSTRAK

Analisis Kebijakan Implementasi Sistem Zonasi Terhadap Mutu Pendidikan di Sekolah (SMAN 14 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah yang ditimbulkan dengan adanya kebijakan sistem radius zonasi yang mengatur PPDB (penerimaan peserta didik baru). Adanya instansi swasta pendidikan yang tutup karna calon siswa yang tidak terakomodasi dengan baik. Dilihat dari kemampuan belajar siswa-siswa yang diterima relative rendah, sehingga kesulitan dalam memahami materi. Dengan kebijakan sistem ini tidak dapat dipungkiri siswa yang memiliki prestasi kurang dihargai karna tidak memiliki kesempatan untuk belajar di sekolah pilihannya, mengakibatkan berkurangnya minat belajar siswa.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan: 1) mengetahui kebijakan implementasi sisten radius zonasi di sekolah SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru. 2) Mengetahui peningkatan mutu pendidikan dengan kebijakan implementasi sistem radius zonasi di SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif murni.

Subjek dalam penelitian ini yaitu ditingkat kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dalam hal ini sebagai lokasi penelitian, maka sumber data dan informen yang dipilih adalah Kepala sekolah sebagai perpanjangan tangan dari Dinas pendidikan Kota Pekanbaru, Wali siswa/ siswi yang di wakili oleh ketua komite sekolah SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru, Masyarakat Bukit raya yang akan di wakili oleh RT dan RW. Dan adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Kebijakan implementasi sistem PPDB (penerimaan peserta didik baru) berdasarkan radius zonasi dan mutu pendidikan di SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Kebijakan implementasi sitem zonasi di SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik, sekolah sudah melakukan langkah-langkah yang semestinya dilakukan, 2) Setelah diberlakukannya sistem PPDB (penerimaan peserta didik baru) berdasarakan sistem radius zonasi di SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru, terjadi penurunan mutu pendidikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata kunci : Kebijakan Implementasi Sistem Zonasi, Mutu Pendidikan, SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru.

Policy Analysis of Zoning System Implementation on Quality of Education in Schools (SMAN 14 Simpang Tiga, Bukit Raya District, Pekanbaru City).

This research is motivated by the problems caused by the zoning radius system policy that regulates the admission of new students. There are private educational institutions that are closed because prospective students are not well accommodated. Judging from the students' learning ability received is relatively low, so it is difficult to understand the material. With this system policy, it is undeniable that students who excel are not appreciated because they do not have the opportunity to study in the school of their choice, which results in reduced student interest in learning.

Based on these indicators, this study aims to: 1) determine the policy implementation of the zoning radius system at SMAN 14 Simpang Tiga, Pekanbaru. 2) Knowing the improvement of the quality of education with the implementation policy of the zoning radius system at SMAN 14 Simpang Tiga, Pekanbaru. Data collection techniques used in this study were through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used was pure qualitative descriptive analysis.

The subjects in this study were at the level of the Bukit Raya sub-district, Pekanbaru City in this case as the research location, so the data source and informants selected were the school principal as an extension of the Pekanbaru education office, guardians of students represented by the head of the school committee of SMAN 14 Simpang Tiga, Pekanbaru, and the Bukit Raya community which will be represented by RT and RW. Furthermore, the object of this research is the new student admission system implementation policy based on the zoning radius and the quality of education at SMAN 14 Simpang Tiga, Pekanbaru. The results showed that, 1) The zoning system implementation policy at SMAN 14 Simpang Tiga, Pekanbaru has been going well, the school has taken steps that should be taken, 2) After the implementation of the new student admission system based on the zoning radius system at SMAN 14 Simpang Tiga, Pekanbaru, has decreased the quality of education.

Keyword: Zoning System Implementation Policy, Education Quality, SMAN 14 Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

نبذة مختصرة

معمرنسوتييون : تحليل سياسة تنفيذ نظام تقسيم المناطق على جودة التعليم في المدارس (SMAN
(14 kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru

هذا البحث مدفوع بالمشاكل التي تسببها سياسة نظام نصف القطر لتقسيم المناطق التي تنظم PPDB (قبول الطلاب الجدد). هناك مؤسسات تعليمية خاصة مغلقة لأن الطلاب المحتملين لا يتم استيعابهم بشكل صحيح.

كان الحكم من قدرة الطلاب على التعلم التي تم قبولها منخفضاً نسبياً ، لذلك كان من الصعب فهم المادة. مع سياسة هذا النظام ، لا يمكن إنكار أن الطلاب الذين حققوا إنجازات لا يتم تقديرهم لأنه لا يملك لهم الفرصة للدراسة في المدرسة التي يختارونها ، مما يؤدي إلى انخفاض اهتمام الطلاب بالتعلم. بناءً على هذه الظاهرة ، تهدف هذه الدراسة إلى : (1) تحديد تنفيذ سياسة نظام نصف قطر تقسيم المناطق في المدرسة SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru ، (2) معرفة تحسين جودة التعليم من خلال سياسة تنفيذ نظام نصف قطر تقسيم المناطق في SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru. كانت تقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من خلال الملاحظة والمقابلة والتوثيق. تقنية تحليل البيانات المستخدمة هي تحليل وصفي نوعي خالص.

كانت الموضوعات في هذه الدراسة هي مستوى المنطقة الفرعية بوكيت رايا كوتا بيكان بارو في هذه الحالة كموقع بحث، لذلك كان مصدر البيانات والمخبرين الذين تم اختيارهم هي مدير المدرسة كامتداد لمكتب التعليم في مدينة بيكان بارو. والد طالب/طالبة يمثلته رئيس لجنة المدرسة SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru ، مجتمع بوكيت رايا الذي سيمثله RT و RW. والهدف من هذا البحث هو سياسة تنفيذ نظام PPDB (قبول الطلاب الجدد) على أساس نصف قطر التقسيم وجودة التعليم في SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru. أظهرت النتائج أن، (1) سياسة تنفيذ نظام تقسيم المناطق في SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru تعمل بشكل جيد ، وقد اتخذت المدارس خطوات ينبغي اتخاذها، (2) بعد تنفيذ نظام PPDB (قبول الطلاب الجدد) على أساس نظام نصف قطر التقسيم في SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru ، كان هناك انخفاض في جودة التعليم.

الكلمات الرئيسية: سياسة تنفيذ نظام تقسيم المناطق، جودة التعليم، SMAN 14 Simpang Tiga
Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Permasalahan.....	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Batasan Masalah	8
3. Rumusan Masalah.....	9
4. Tujuan Penelitian.....	9
5. Manfaat Penelitian.....	10
6. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORETIS	
A. Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik	13
1. Pengertian Kebijakan Publik	15
2. Pendekatan-Pendekatan Kebijakan Publik	20
B. Konsep Implementasi Kebijakan.....	22
1. Implementasi Kebijakan	23
2. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan	27
3. Faktor-faktor Implementasi Kebijakan.....	29
4. Faktor-faktor Pendukung/ Penghambat Implementasi Kebijakan.....	37
C. Konsep Pendekatan Implementasi	41
D. Evaluasi/ Dampak Implementasi Kebijakan	42
E. Kebijakan Pendidikan	44
1. Pengertian Sekolah Sistem Radius Zonasi	46
2. Kebijakan Pemerintah tentang Zonasi Sekolah/ Landasan Hukum.....	47
F. Kendala Pelaksanaan Pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB di SMA 14 Kota Pekanbaru.....	54
G. Pengertian Mutu Pendidikan	55
H. Standar Proses Pendidikan.....	64
1. Perencanaan Peroses Pendidikan.....	66
2. Silabus	66
I. Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Mutu	70
J. Pendukung dan Penghambat Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas	72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pendukung dalam Peningkatan Mutu Pendidikan	72
2. Penghambat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan	75
K. Penelitian Relevan	76
L. Konsep Operasional.....	80

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian	87
1. Jenis Penelitian	87
2. Desain Penelitian.....	88
B. Subjek dan Objek Penelitian	89
C. Waktu dan Tempat Penelitian	91
D. Teknik Pengumpulan Data	92
E. Teknik Analisis Data.....	93

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	92
1. Geografis dan Demografis	92
2. Pendidikan Masyarakat Simpang Tiga	93
3. Sejarah SMA 14 Pekanbaru	94
4. Visi dan Misi SMA 14 Pekanbaru	97
5. Profil SMA 14 Pekanbaru	99
6. Tenaga Pengajar SMA 14 Pekanbaru	100
7. Siswa SMA 14 Pekanbaru	101
B. Pembahasan dan Analisis Data.....	102
1. Kebijakan Implementasi Sistem Zonasi	105
2. Mutu Pendidikan.....	116

BAB V

A. Kesimpulan	123
B.. Saran-saran	125

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Sepenuh tulus penulis panjatkan syukur kehadirat Allah SWT. Sang maha sempurna, penguasa alam semesta, pengijabah antara do'a dan cita-cita. Berkat keberkahan dan keridhoan-Nya peneliti ini dapat menulis selesaikan hingga dapat dipertahankan dewan penguji dalam sidang munaqasah.

Semoga Allah SWT mencurahkan shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW sang pembawa risalah, penuntun ummat dengan *uswah* dan *qudwah*, penebar rahmat untuk mencapai *hasanah* dunia akhirat.

Tesis ini disusun sebagai salah satu tugas akademis dalam rangka mencapai gelar Master Pendidikan Islam (M.Pd.I) dalam program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat keterlibatan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih atas perhatian, dorongan dan bantuan semua pihak yang telah menjadi motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dan bisa merampungkan perkuliahan. Dengan penuh ketulusan penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husni, MA. Sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah memberi kesempatan kepada penulis menempuh pendidikan pada lembaga yang dipimpinnya.

3. Ibu Dr. Alwizar S,Ag. M,Ag. Sebagai ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, yang telah memberi nasehat, arahan dan kemudahan akademika kepada penulis selama mengikuti perkuliahan dan penulisan tesis.
4. Bapak Dr. Zamsiswaya M,Ag sebagai Dosen pembimbing I yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan bantuan selama menjalani pendidikan sampai akhir perkuliahan.
5. Bapak Dr. Alwizar S,Ag. M,Ag. sebagai Dosen pembimbing II yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan bantuan selama menjalani pendidikan sampai akhir perkuliahan. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, informasi pemikiran, serta wawasan selama perkuliahan.
7. Penuh cinta sayang untuk Ayahanda Ali Hasan Nasution dan Ibunda Masnawati Siregar do'a dan perjuangan yang penuh ikhlas diberikan kepada ananda dalam menjalani proses kehidupan. Kakak Suryani Nst, Nur Aini Nst, Asrawati Nst, serta Adek M. Fauzi Nst dan Syariah Nst.
8. Kepala Sekolah SMA 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru yang telah memberikan kemudahan selama proses penelitian disekolah tersebut, mudah-mudahan proses yang dilewati menjadi bekal keberkahan di masa depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Tesis ini juga penulis persembahkan dengan penuh penghargaan atas perhatian teman-teman seangkatan atau sekelas, terutama kosma menjadi motivasi dalam proses penyelesaian yang saya lewati.
10. Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah menyediakan sumber referensi selama penulisan tesis.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu melalui penulisan ini, baik yang langsung terlibat maupun yang tidak penulis mengucapkan terimakasih.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi pijakan bagi perkembangan akademik penulis untuk melangkah pada tahap selanjutnya.

Penulis202....

MUHAMMAR NASUTION

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi yang digunakan dalam tulisan ini mengacu pada buku *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah* yang diterbitkan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	<i>alif</i>	A	ط	<i>ṭā'</i>	Th
ب	<i>bā'</i>	B	ظ	<i>ḍā'</i>	Zh
ت	<i>tā'</i>	T	ع	<i>'ain</i>	'
ث	<i>thā'</i>	TS	غ	<i>ghayn</i>	GH
ج	<i>jīm</i>	J	ف	<i>fā'</i>	F
ح	<i>ḥā'</i>	H	ق	<i>gāf</i>	Q
خ	<i>khā'</i>	KH	ك	<i>kāf</i>	K
د	<i>dāl</i>	D	ل	<i>lām</i>	L
ذ	<i>dhāl</i>	DZ	م	<i>mīm</i>	M
ر	<i>rā'</i>	R	ن	<i>nūn</i>	N
ز	<i>zā'</i>	Z	ه	<i>hā'</i>	H
س	<i>sīn</i>	S	و	<i>wau</i>	W
ش	<i>shīn</i>	Sy	ء	<i>hamzah</i>	'
ص	<i>ṣād</i>	Sh	ي	<i>yā'</i>	Y
ض	<i>dlād</i>	DI			

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal dan Diftong

Setiap Penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “ a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “ u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a)	A	Misalnya	قال	Menjadi	qala	Panjang =
Vokal (i)	I	Misalnya	قيل	Menjadi	qila	Panjang =
Vokal (u)	U	Misalnya	دون	Menjadi	duna	Panjang =

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara difitog wawu dan ya’ setelah fatha ditulis dengan “aw” dan “ay” contoh sebagai berikut:

Diftong	او	Misalnya	قول	Menjadi	qawlun	(aw) =
Diftong	اي	Misalnya	خير	Menjadi	khayrun	(ay) =

C. Ta’marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya:

في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Muhammar Nasution :

Analisis Kebijakan Implementasi Sistem Zonasi Terhadap Mutu Pendidikan di Sekolah (SMAN 14 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah yang ditimbulkan dengan adanya kebijakan sistem radius zonasi yang mengatur PPDB (penerimaan peserta didik baru). Adanya instansi swasta pendidikan yang tutup karna calon siswa yang tidak terakomodasi dengan baik. Dilihat dari kemampuan belajar siswa-siswa yang diterima relative rendah, sehingga kesulitan dalam memahami materi. Dengan kebijakan sistem ini tidak dapat dipungkiri siswa yang memiliki prestasi kurang dihargai karna tidak memiliki kesempatan untuk belajar di sekolah pilihannya, mengakibatkan berkurangnya minat belajar siswa.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan: 1) mengetahui kebijakan implementasi sisten radius zonasi di sekolah SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru. 2) Mengetahui peningkatan mutu pendidikan dengan kebijakan implementasi sistem radius zonasi di SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif murni.

Subjek dalam penelitian ini yaitu ditingkat kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dalam hal ini sebagai lokasi penelitian, maka sumber data dan informen yang dipilih adalah Kepala sekolah sebagai perpanjangan tangan dari Dinas pendidikan Kota Pekanbaru, Wali siswa/ siswi yang di wakili oleh ketua komite sekolah SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru, Masyarakat Bukit raya yang akan di wakili oleh RT dan RW. Dan adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Kebijakan implementasi sistem PPDB (penerimaan peserta didik baru) berdasarkan radius zonasi dan mutu pendidikan di SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Kebijakan implementasi sitem zonasi di SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik, sekolah sudah melakukan langkah-langkah yang semestinya dilakukan, 2) Setelah diberlakukannya sistem PPDB (penerimaan peserta didik baru) berdasarakan sistem radius zonasi di SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru, terjadi penurunan mutu pendidikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata kunci : Kebijakan Implementasi Sistem Zonasi, Mutu Pendidikan, SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru.

Policy Analysis of Zoning System Implementation on Quality of Education in Schools (SMAN 14 Simpang Tiga, Bukit Raya District, Pekanbaru City).

This research is motivated by the problems caused by the zoning radius system policy that regulates the admission of new students. There are private educational institutions that are closed because prospective students are not well accommodated. Judging from the students' learning ability received is relatively low, so it is difficult to understand the material. With this system policy, it is undeniable that students who excel are not appreciated because they do not have the opportunity to study in the school of their choice, which results in reduced student interest in learning.

Based on these indicators, this study aims to: 1) determine the policy implementation of the zoning radius system at SMAN 14 Simpang Tiga, Pekanbaru. 2) Knowing the improvement of the quality of education with the implementation policy of the zoning radius system at SMAN 14 Simpang Tiga, Pekanbaru. Data collection techniques used in this study were through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used was pure qualitative descriptive analysis.

The subjects in this study were at the level of the Bukit Raya sub-district, Pekanbaru City in this case as the research location, so the data source and informants selected were the school principal as an extension of the Pekanbaru education office, guardians of students represented by the head of the school committee of SMAN 14 Simpang Tiga, Pekanbaru, and the Bukit Raya community which will be represented by RT and RW. Furthermore, the object of this research is the new student admission system implementation policy based on the zoning radius and the quality of education at SMAN 14 Simpang Tiga, Pekanbaru. The results showed that, 1) The zoning system implementation policy at SMAN 14 Simpang Tiga, Pekanbaru has been going well, the school has taken steps that should be taken, 2) After the implementation of the new student admission system based on the zoning radius system at SMAN 14 Simpang Tiga, Pekanbaru, has decreased the quality of education.

Keyword: Zoning System Implementation Policy, Education Quality, SMAN 14 Pekanbaru.

نبذة مختصرة

معمرنسوتيون : تحليل سياسة تنفيذ نظام تقسيم المناطق على جودة التعليم في المدارس (SMAN 14 kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru

هذا البحث مدفوع بالمشاكل التي تسببها سياسة نظام نصف القطر لتقسيم المناطق التي تنظم PPDB (قبول الطلاب الجدد). هناك مؤسسات تعليمية خاصة مغلقة لأن الطلاب المحتملين لا يتم استيعابهم بشكل صحيح.

كان الحكم من قدرة الطلاب على التعلم التي تم قبولها منخفضاً نسبياً ، لذلك كان من الصعب فهم المادة. مع سياسة هذا النظام ، لا يمكن إنكار أن الطلاب الذين حققوا إنجازات لا يتم تقديرهم لأنه لا يملك لهم الفرصة للدراسة في المدرسة التي يختارونها ، مما يؤدي إلى انخفاض اهتمام الطلاب بالتعلم. بناءً على هذه الظاهرة ، تهدف هذه الدراسة إلى : (1) تحديد تنفيذ سياسة نظام نصف قطر تقسيم المناطق في المدرسة SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru ، (2) معرفة تحسين جودة التعليم من خلال سياسة تنفيذ نظام نصف قطر تقسيم المناطق في SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru. كانت تقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من خلال الملاحظة والمقابلة والتوثيق. تقنية تحليل البيانات المستخدمة هي تحليل وصفي نوعي خالص.

كانت الموضوعات في هذه الدراسة هي مستوى المنطقة الفرعية بوكيت رايا كوتا بيكان بارو في هذه الحالة كموقع بحث، لذلك كان مصدر البيانات والمخبرين الذين تم اختيارهم هي مدير المدرسة كامتداد لمكتب التعليم في مدينة بيكان بارو. والد طالب/طالبة يمثلته رئيس لجنة المدرسة SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru ، مجتمع بوكيت رايا الذي سيمثله RT و RW. والهدف من هذا البحث هو سياسة تنفيذ نظام PPDB (قبول الطلاب الجدد) على أساس نصف قطر التقسيم وجودة التعليم في SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru. أظهرت النتائج أن، (1) سياسة تنفيذ نظام تقسيم المناطق في SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru تعمل بشكل جيد ، وقد اتخذت المدارس خطوات ينبغي اتخاذها، (2) بعد تنفيذ نظام PPDB (قبول الطلاب الجدد) على أساس نظام نصف قطر التقسيم في SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru ، كان هناك انخفاض في جودة التعليم.

الكلمات الرئيسية: سياسة تنفيذ نظام تقسيم المناطق، جودة التعليم، SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Permasalahan.....	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Batasan Masalah	8
3. Rumusan Masalah.....	9
4. Tujuan Penelitian.....	9
5. Manfaat Penelitian.....	10
6. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORETIS	
A. Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik	13
1. Pengertian Kebijakan Publik	15
2. Pendekatan-Pendekatan Kebijakan Publik	20
B. Konsep Implementasi Kebijakan.....	22
1. Implementasi Kebijakan	23
2. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan	27
3. Faktor-faktor Implementasi Kebijakan.....	29
4. Faktor-faktor Pendukung/ Penghambat Implementasi Kebijakan.....	37
C. Konsep Pendekatan Implementasi	41
D. Evaluasi/ Dampak Implementasi Kebijakan	42
E. Kebijakan Pendidikan	44
1. Pengertian Sekolah Sistem Radius Zonasi	46
2. Kebijakan Pemerintah tentang Zonasi Sekolah/ Landasan Hukum.....	47
F. Kendala Pelaksanaan Pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB di SMA 14 Kota Pekanbaru.....	54
G. Pengertian Mutu Pendidikan	55
H. Standar Proses Pendidikan.....	64
1. Perencanaan Peroses Pendidikan.....	66
2. Silabus	66
I. Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Mutu	70
J. Pendukung dan Penghambat Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas	72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pendukung dalam Peningkatan Mutu Pendidikan	72
2. Penghambat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan	75
K. Penelitian Relevan	76
L. Konsep Operasional.....	80

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian	87
1. Jenis Penelitian	87
2. Desain Penelitian.....	88
B. Subjek dan Objek Penelitian	89
C. Waktu dan Tempat Penelitian	91
D. Teknik Pengumpulan Data	92
E. Teknik Analisis Data.....	93

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	92
1. Geografis dan Demografis	92
2. Pendidikan Masyarakat Simpang Tiga	93
3. Sejarah SMA 14 Pekanbaru	94
4. Visi dan Misi SMA 14 Pekanbaru	97
5. Profil SMA 14 Pekanbaru	99
6. Tenaga Pengajar SMA 14 Pekanbaru	100
7. Siswa SMA 14 Pekanbaru	101
B. Pembahasan dan Analisis Data.....	102
1. Kebijakan Implementasi Sistem Zonasi	105
2. Mutu Pendidikan.....	116

BAB V

A. Kesimpulan	123
B.. Saran-saran	125

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Zonasi merupakan lahir dari perbaikan pendidikan yang di mulai sejak era proklamasi tahun 1945 sampai di era reformasi saat ini, pendidikan merupakan pembicaraan yang hangat dikalangan aktivis pendidikan maupun kalangan pakar pendidikan dalam rangka memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Dengan terus membangun disegala bidang terutama dalam bidang pendidikan. Pendidikan harus dapat memberi kesadaran kepada setiap individu akan potensi yang dimilikinya, dan lebih dari itu pendidikan harus mampu merangsang individu peserta didiknya untuk mempergunakan potensi tersebut sesuai dengan tatanan nilai kemanusiaan.

Pendidikan merupakan hal yang fundamental bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara, dengan demikian Pemerintah (Negara) memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan bagi warga negaranya dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 butir (1) yaitu Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.¹

Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“mencerdaskan kehidupan bangsa” dan untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan kesempatan dan pencapaian mutu pendidikan akan membuat warga Negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (*life skill*) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai – nilai Pancasila.

Pendidikan pada dasarnya adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya, agar menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya berfungsi secara efektif, efisien dan aktual dalam kehidupan bermasyarakat.²

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu untuk dapat hidup dan mengikuti perkembangan zaman yang berkembang pesat, seiring berkembangnya ilmu teknologi dan kebudayaan masyarakat, pendidikan di anggap penting karena pendidikan merupakan suatu jalan yang dapat di tempuh dalam rangka meningkatkan kualitas SDM setiap individu. Kualitas pendidikan merupakan tolak ukur dalam membentuk karakter suatu bangsa, pendidikan yang berkualitas akan melahirkan generasi bangsa yang berwawasan luas dan mempunyai ilmu pengetahuan yang mampu menghadapi setiap kondisi apapun.

² Nana Sudjana, *Dasar-dasar Peroses belajar mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensinsindo, 2013), hlm. 31.

Dengan demikian dipandang perlu Pemerintah melakukan perbaikan secara berkesinambungan terhadap semua komponen yang ada dalam pendidikan. Tujuan pendidikan Nasional dapat tercapai dengan menggunakan strategi yang dapat menjawab setiap permasalahan pendidikan yang terjadi. Permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini meliputi permasalahan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, dan manajemen pendidikan. Masalah penting dalam dunia pendidikan saat ini adalah kurangnya pemerataan mutu pendidikan hampir di setiap negara. Di Indonesia, masih sangat jelas dan nyata adanya kesenjangan mutu pendidikan hampir di setiap daerah.

Untuk mewujudkan EFA (*Education for All*) sesuai yang diinginkan oleh semua pihak memang tidak semudah membalikan telapak tangan, hal ini diperlukan proses yang panjang dan sistematis. Keterlibatan semua unsur sangat diperlukan demikian juga kesadaran masyarakat menjadi daya dukung untuk terwujudnya maksud tersebut. Memang diakui munculnya kendala-kendala dalam mewujudkan EFA sangat dipengaruhi dengan banyaknya permasalahan di bidang pendidikan yang dihadapi oleh Indonesia. empat masalah pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya, masalah yang dimaksud yaitu: Masalah pemerataan pendidikan, Masalah mutu pendidikan, Masalah efisiensi pendidikan, dan Masalah relevansi pendidikan.³

³ Suyahman, *Seminar Nasional Pendidikan Uns & Ispi Jawa Tengah*, " Pendidikan Untuk Semua Antara Harapan Dan Kenyataan (Studi Kasus Permasalahan Pendidikan Di Indonesia)", Surakarta, Edisi 21, November 2015, hlm. 4.

Diantara permasalahan pendidikan yang ada, permasalahan yang menjadi sorotan penuh oleh Pemerintah saat ini ialah permasalahan pemerataan pendidikan bermutu yang belum merata di Indonesia, sedangkan pendidikan merupakan amanat daripada UUD 1945 bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah “ Mencerdaskan kehidupan bangsa

Departemen Pendidikan Nasional mengemukakan bahwa pada tahun 2005, kebutuhan (kekurangan) guru pada semua jenjang di Indonesia 218.838 orang. Pendidikan menengah saja memerlukan guru 41.523 orang yang terdiri dari 29.303 guru SMA dan 12.220 guru SMK. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebaran guru di Indonesia tidak sesuai dengan kebutuhan di setiap satuan pendidikan. Terdapat kecenderungan surplus guru di daerah tertentu, sementara di daerah lainnya (di luar Jawa) kekurangan guru.⁴

Menurut survei *Political and Economic Risk Consultant* (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan *The World Economic Forum Swedia* (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survei dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.⁵

⁴ Sri Winarsih, “Kinerja Pendidikan Menengah Di Indonesia Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”, Jurnal Pendidikan , Edisi 2, November 2014, hlm. 2.

⁵ Muhammad Idrus, “ *Mutu Pendidikan dan Pemerataan Pendidikan di Daerah Quality Of Educational Equality*”, PSIKOPEDAGOGIA, Edisi. 2, Desember 2012, hlm. 6.

Dengan demikian menjadi alasan kuat masyarakat bangsa Indonesia khususnya pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan untuk melakukan format ulang terhadap proses pendidikan yang dijalankannya. Sudah seharusnya bangsa ini melakukan perbaikan mutu pendidikan, agar dapat bersaing dalam situasi global.

Berdasarkan hal tersebut salah satu upaya pemerintah dalam rangka menuntaskan pemerataan pendidikan yaitu dengan cara mengaplikasikan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2018. Ketentuan sistem zonasi yg dimuat dalam PPDB tahun 2018 ini berdasar pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan dengan objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.⁶

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Sistem zonasi yang merupakan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 kepada Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag ini kemudian dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah favorit

⁶ PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018.

dan tidak favorit, agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia.

Anggota komisi V DPRD Riau Ade Hartati menyampaikan kepada Riau Pos, Kamis (11/7). Menurut dia, sistem zonasi yang dibuat pemerintah pusat sudah sangat baik. Akan tetapi pemerintah daerah (PEMDA) tidak siap dengan fasilitas pendidikan yang ada. Ia mencontohkan jumlah sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang jauh lebih banyak di banding SMA.⁷

Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru diketahui bahwa siswa yang diterima melalui sistem zonasi memiliki kemampuan belajar yang relatif rendah. Mereka cukup kesulitan dalam memahami materi yang telah disampaikan. Berbeda dengan siswa yang diterima melalui jalur prestasi, mereka lebih cepat dalam memahami materi. Bahkan diantara siswa yang diterima melalui sistem zonasi ada siswa yang masih kesulitan dalam membaca.

Setelah di berlakukan sistem radius zonasi ada beberapa permasalahan yang terjadi di SMAN 14 pekanbaru kec. Bukit Raya di antara permasalahan yang ada ialah: Dengan diberlakukan sistem radius zonasi memberikan persepsi kepada masyarakat bahwa prestasi akademik siswa menjadi kurang dihargai, adanya calon siswa yang tidak terakomodasi, minimnya sosialisasi sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) kepada calon peserta didik dan orang tua, sehingga menimbulkan kebingungan, banyak sekolah swasta yang gulung tikar dikarenakan

⁷ Riau Pos, Sistem PPDB, <http://riaupos.co/203497-berita-pemda-dinilai-tak-siap-sistem-zonasi.html> , Tgl, 11/10/2019, 23.00.

kekurangan murid, berkurangnya minat belajar siswa karena terbatas oleh radius zonasi.

Oleh karena pemberakuan PPDB dengan sistem zonasi maka mengakibatkan menurunnya mutu pendidikan di sekolah tersebut, dikarenakan sistem PPDB yang berlaku tak memandang anak itu mampu secara kualitas atau memenuhi persyaratan nilai, untuk di terima di sebuah sekolah tertentu, yang menjadi barometer pelaksanaan PPDB dengan sistem radius zonasi adalah radius wilayah.

Adapun mekanisme PPDB yang berkaitan sistem radius zonasi pihak SMA 14 menerapkan radius 500 meter memutar. Dengan begitu sistem zonasi ini tidak ada lagi bicara soal batas wilayah. Misalnya SMA yang berada di Pekanbaru yang berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Walaupun anak Kampar karena sekolahnya dekat dengan Pekanbaru mereka boleh sekolah di Pekanbaru. Adapun 20 persennya untuk jalur anak orang miskin. Jalur ini tidak melihat radius 500 meter. Misalnya kalau radius 500 meter kuota anak miskin belum terpenuhi, maka sekolah dapat menambah radius lagi.⁸

Berdasarkan uraian singkat yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM ZONASI TERHADAP MUTU PENDIDIKAN PADA STANDAR PROSES DI SEKOLAH (SMAN 14 KEL. SIMPANG TIGA KEC. BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU).

⁸ TU SMA 14, Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kot. Pekanbaru 12 februari 2020.

B. Penegasan Istilah

Sistem Zonasi merupakan sistem PPDB oleh Sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah. Bagi sekolah yang diselenggarakan Pemerintah daerah tersebut wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut.

Selanjutnya adapun yang dimaksud dengan mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan system pendidikan nasional⁹

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut

- a. Kebijakan system PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) berdasarkan radius zonasi
- b. Implementasi kebijakan sekolah terhadap system radius zonasi

⁹ Undang-Undang, No.. 63 Tahun 2009. Permendiknas Penjaminan Mutu Pendidikan.

- c. Implementasi kebijakan radius zonasi tersebut bermanfaat bagi masyarakat pengguna
- d. Faktor-fakto yang menjadi pendorong dan penghambat dalam Implementasi sistem radius zonasi
- e. Hasil yang di capai dengan penerapan sistem zonasi pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan di masyarakat Simpang Tiga Kota Pekanbaru

2. Batasan Masalah

Implementasi kebijakan pemerintah terkait sitem radius zonasi sekolah, yang merupakan tugas tambahan Dinas Pendidikan dan sekolah, saat ini diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Sehingga di harapkan dengan diberlakukannya sistem radius zonasi sekolah, dapat membantu Pemerintah dalam upaya pemerataan mutu pendidikan d indonesia pada umumnya dan daerah pada khususnya, sehingga istilah sekolah favorit diharapkan tidak ada lagi dalam dunia pendidikan.

Sementara itu masih dirasakan kekhawatiran sebagian orang tua terhadap sistem radius zonasi tersebut karena adanya calon siswa yang tidak terakomodasi, minimnya sosialisasi sistem PPDB kepada calon peserta didik dan orang tua, sehingga menimbulkan kebingungan. Permasalahan tersebut mendorong penulis untuk melihat bagaimana kebijakan implementasi terhadap peningkatan mutu pendidikan pada standar proses di sekolah dan apakah masyarakat merasakan manfaaatnya. pada tataran pelaksana dan manfaatnya bagi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya.

3. Rumusan Masalah

Selaras dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana kebijakan implementasi sistem zonasi di sekolah SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru ?
- b. Bagaimana peningkatan mutu pendidikan pada standar proses dengan kebijakan implementasi sistem zonasi di SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru ?

4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yakni :

- a. Untuk mengetahui kebijakan implementasi sistem zonasi di sekolah SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui peningkatan mutu pendidikan pada standar proses dengan kebijakan implementasi sistem zonasi di SMAN 14 Simpang Tiga Kota Pekanbaru

5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, dalam penelitian ini akan dihasilkan deskripsi hasil analisis di lapangan tentang kebijakan sistem radius zonasi sekolah yang dirumuskan pemerintah dilihat dari implementasinya pada pelaksana yakni dinas pendidikan dan sekolah, juga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dalam menyekolahkan anaknya di

kecamatan Bukit Raya, yang selanjutnya akan dijadikan rujukan Kementerian Pendidikan Nasional sebagai pemegang kebijakan.

6. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini maka dibuatlah sistematika pembahasan. Tesis ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, dan pembahasan ini disusun secara sistematis, sehingga kaitan antara yang satu dengan yang lainnya tidak terputus. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang, latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori yang berisikan tentang, pengertian kebijakan publik, pendekatan-pendekatan dalam kebijakan publik, implementasi kebijakan, tahap-tahap implementasi kebijakan, factor-faktor implementasi kebijakan, factor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan, konsep implementasi, evaluasi atau dampak implementasi kebijakan, kebijakan pendidikan, pengertian system radius zonasi, kebijakan pemerintah tentang system radius zonasi dan landasan hukumnya, penelitian relevan, konsep operasional.

BAB III: Metode Penelitian yang berisikan tentang, jenis penelitian, waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan dan analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian.

BAB V : Penutup, bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan pokok dalam ini dan saran-saran yang disampaikan penulis kepada pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan.

KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

BAB II

LANDASAN TEORETIS DAN KONSEP OPERASIONAL

A. Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik

Kebijakan dalam konteks ini adalah kebijakan yang terkait dengan masalah pendidikan. Pendidikan merupakan proses tanpa akhir yang diupayakan oleh siapa pun, terutama negara. Pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ilmu pengetahuan. Dilihat dari makna sempitnya, pendidikan identik dengan sekolah. Berkaitan dengan hal ini, pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan sekolah sebagai lembaga mendidik. Pendidikan merupakan segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja (usia sekolah) yang diserahkan kepada pihak sekolah agar mempunyai kemampuan kognitif dan kesiapan mental yang sempurna dan kesadaran maju yang berguna bagi mereka untuk terjun ke masyarakat, menjalin hubungan sosial, dan memikul tanggung jawab mereka sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.

Sekolah sebagai lembaga yang harus menjadi tempat berlangsungnya proses rekayasa perubahan tingkah laku. Sekolah hendaknya dirancang seperti halnya dengan para insinyur yang bekerja merancang mesin yang canggih. Sekolah sebagai berlangsungnya proses rekayasa perubahan tingkah laku harus didasarkan kurikulum yang dirancang secara ilmiah dan bentuk-bentuk kegiatannya harus diorganisasikan dengan penuh perhatian dan dilaksanakan dengan penuh disiplin. Kaitannya dengan pendidikan, sekolah sebagai wadah yang tepat guna menumbuhkan tingkah laku/akhlak siswa.

Aktivitas pendidikan selalu bersentuhan dengan masyarakat, dan harus didukung dengan campur tangan pemerintah berupa kebijakan public, oleh karena itu kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik, dan kebijakan tersebut akan memperoleh reaksi langsung dari publik.

Kebijakan pendidikan dengan manajemen pendidikan akan selalu berbicara tentang manajemen pendidikan secara makro. Secara prinsip, manajemen pendidikan merupakan aplikasi ilmu manajemen ke dalam lingkup pendidikan dan merupakan bagian dari *applied sciences* (ilmu terapan) terutama pada bidang pendidikan baik di sekolah maupun luar sekolah. Prinsip-prinsip yang dimiliki oleh manajemen pendidikan tidak berbeda dengan prinsip-prinsip yang ada pada konsep manajemen pada umumnya, demikian pula dengan fungsi-fungsi manajemen pendidikan adalah juga merupakan rangkaian konsep dari rumusan manajemen.

Penerapan manajemen di bidang pendidikan diarahkan pada usaha untuk menunjang kelancaran pencapaian tujuan pendidikan, sedangkan untuk fungsi dan strategi dari konsep manajerial pada prinsipnya sama dengan yang diterapkan dalam lingkup manajemen.

Pada dasarnya aspek pendidikan yang merupakan kajian manajemen pendidikan merupakan *public goods* bukan *private goods*. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan barang dan jasa milik umum (publik), yang mana masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran (pasal 31 UUD 1945), dan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah untuk

melaksanakannya, utamanya peranan mendasar menyediakan kesempatan belajar. Oleh karena pendidikan merupakan *public goods*, maka sudah semestinya kajian kebijakan pendidikan masuk dalam perspektif kebijakan publik dalam dimensi kajian manajemen pendidikan yang multidisipliner.

1. Pengertian Kebijakan Publik

Sebelum membicarakan mengenai kebijakan publik, sangat perlu memahami terlebih dahulu konsep kebijakan. Hal ini perlu dilakukan karena begitu luasnya penggunaan konsep dan istilah kebijakan, sehingga akan menimbulkan sudut pandang yang berbeda dalam memahami konsep kebijakan dan kebijakan publik, khususnya kebijakan pendidikan.

Oleh sebab itu sebelum kita lanjut dalam memahami konsep kebijakan ada baiknya terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pengertian kebijakan itu sendiri, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini.

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana dikutip dalam buku Administrasi Pendidikan Kontemporer karya Syaiful Syagala diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dandasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya

sebagai pernyataan cita-cita, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran.¹⁰

Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman dalam memandang bahwa itu sebuah kebijakan, sebagai berikut :¹¹

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Terdapat perbedaan definisi tentang konsep kebijakan publik (*public policy*) dengan kebijakan privat (*private policy*). Kebijakan publik biasanya dibuat oleh pemerintah dan memberikan dampak yang besar dan luas pada publik

¹⁰ Syaiful Syagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.97.

¹¹ Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm. 40.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(masyarakat), misalnya kebijakan Sisdiknas dan UAN. Sedangkan kebijakan privat biasanya dibuat oleh badan perseorangan atau swasta, namun bisa juga kebijakan tersebut membawa dampak dan mengikat pada publik (masyarakat), misalnya kebijakan yang berupa iklan dari perusahaan di media televisi yang memberikan dampak yang besar bagi publik.

Ketika istilah kebijakan dan publik digabung menjadi satu, yaitu kebijakan publik, memiliki makna yang lebih luas daripada ketika diartikan secara sendiri-sendiri. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja.

Kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah tata kelola Negara (*governance*), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara, sekaligus juga mengelola negara. Mengelola berarti mengendalikan dengan menjadikannya lebih bernilai. Pemerintah suatu negara dalam mengelola negara, tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan kebijakan publik. Inilah tugas pemerintah atau negara sesungguhnya.

Easton memberikan pandangan bahwa kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian

nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky, sebagaimana dikutip Budi Winarno mendefinisikan kebijakan publik sebagai kondisi hipotesis yang awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan¹².

Keban menjelaskan bahwa: “*Public Policy* dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya; dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan implementasinya.”¹³

Dror mendefinisikan kebijakan sebagai *an approach and methodology for design and identification of preferable alternatives in respect to complex problems*. kompleksitas yang dihadapi dalam perkembangan dewasa ini memerlukan

¹² Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama, 2014), hlm. 3.

¹³ Yulianto, *Formulasi dan implementasi kebijakan publik*, (Gorontalo: Universitas Gorontalo 2015), hlm. 5.

berbagai pendekatan yang terdesain secara tepat dalam mencari alternatif - alternatif pemecahan persoalan publik.¹⁴

Dengan demikian kebijakan public merupakan sebuah solusi yang disediakan Pemerintah ataupun pimpinan perusahaan yang terdesain dan terukur yang disusun melalui pendekatan-pendekan yang akuntabel sebagai suatu solusi dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain.

Sedangkan menurut Anderson kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson, mengklasifikasi kebijakan, policy, menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.¹⁵

Amara Raksasatya mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu:

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan

¹⁴ Fisip Untad , JURNAL ACADEMICA , VOL.06 No. 01 Februari 2014.

¹⁵ Arifin, *Kebijakan publik dan Transparansi Penyelenggara*, (Jakarta: PT. PUSTAKA INDONESIA PRESS, 2011), hlm. 40.

3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik (*Public Policy*) adalah kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan atau praktek-praktek kegiatan pemerintah yang terarah yang dialokasikan kepada seluruh masyarakat dan ditujukan untuk kepentingan public dengan tujuan tertentu sehingga tercapai tujuan, tujuan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (*interest public*), dengan strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang acapkali dijabarkan ke dalam bentuk program dan proyek-proyek, serta penyediaan input untuk melaksanakan strategi. Input berupa sumberdaya baik manusia maupun bukan manusia.

2. Pendekatan-Pendekatan dalam Kebijakan Publik

Perumusan kebijakan adalah pijakan awal dalam kebijakan publik di bidang politik, yang terdiri dari 2 lapisan kelompok sosial: 1) lapisan atas dengan jumlah yang sangat kecil (elit) yang selalu mengatur; 2) lapisan bawah (massa) dengan jumlah yang sangat besar sebagai yang diatur, Peraturan Pemerintah mencerminkan kehendak atau nilai-nilai elit yang berkuasa. Masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menciptakan opini tentang isu kebijakan yang seharusnya menjadi agenda politik di tingkat atas.

Sementara birokrat/administrator hanya menjadi mediator bagi jalannya informasi yang mengalir dari atas ke bawah. Elit politik selalu ingin mempertahankan status quo, maka kebijakannya menjadi konservatif. Perubahan

kebijakan bersifat inkremental maupun trial and error yg hanya mengubah atau memperbaiki kebijakan sebelumnya. Maka disaat isu yang berkembang menjadi perhatian publik di bidang pendidikan, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, informasi bias di dapat dengan mudah, sehingga dapat mengetahui kesalahan dalam sebuah kebijakan dapat segera memperbaikinya.¹⁶

kebijakan publik itu sendiri ditetapkan berdasarkan kriteria dan prioritas melalui peroses dan syarat tertentu yakni:

1. Masalah tersebut bersifat mendesak untuk dipecahkan
2. Berhubungan dengan kepentingan publik secara luas baik jumlah maupun cakupannya.
3. disesuaikan dengan kemampuan dan sumberdaya (resources) yang tersedia baik uang, waktu, serta personil. Karena bersifat strategis dan krusial tersebut maka merumuskan masalah kebijakan publik merupakan tahapan yang esensial dalam proses kebijakan publik.¹⁷

Di sisi lain, proses tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak muncul dari sebuah ruang hampa atau tiba-tiba tetapi lahir dari suatu konteks permasalahan atau kebutuhan tertentu. Bahkan kebijakan publik lahir tidak semata sebagai respon atas permasalahan, kebutuhan, atau tekanan tertentu tapi juga dari seperangkat nilai-nilai tertentu.¹⁸

¹⁶ Suarno, Jurnal As-Salam Vol.1(1). 2016:62-72 .

¹⁷ Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 15.

¹⁸ Anik Widiastuti, “Kompetensi Mengajar Guru IPS SMP di Kabupaten Sleman”, NUANSA, Edisi Maret- Agustus 2012, hlm. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taufiqurrokhman juga menjelaskan bahwa dalam menentukan kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel sebagai yakni sebagai berikut:

- a. Tujuan yang akan dicapai. Ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai.
- b. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.
- c. Sumberdaya yang mendukung kebijakan.
- d. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.
- e. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik.
- f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan, dan sebagainya

B. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Oleh sebab itu, Implementasi kebijakan sistem radius zonasi sekolah akan dipahami secara utuh jika pengertiannya dipahami secara utuh, oleh karena itu perlu di rumuskan terlebih dahulu pengertian tentang implementasi kebijakan.

1. Kebijakan Implementasi

Kebijakan implementasi pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya oleh sebab itu kebijakan implementasi dapat dimaknai sebagai suatu proses melaksanakan keputusan atau kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekret presiden) yang dilaksanakan atau diterapkan secara terorganisir beranjak dari isu yang berkembang sehingga mencapai tujuan dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

Dengan demikian terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini.

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan. Implementasi adalah nerpuasa pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁹

Dari pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek yang akan di tuju.

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Dunn, memberikan argumennya tentang implementasi kebijakan sebagai berikut : *Policy implemetation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentilly theoretical*. Sehubungan dengan sifat praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan, maka hal yang wajar

¹⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung: CV Sinar Baru h, 2002), hlm. 70.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi. Hal tersebut disebabkan karena ia terkait dengan tujuan diadakannya kebijakan (*policy goals*) Dan jika dilihat dari konteks implementasi kebijakan, maka hal ini akan berkaitan dengan kekuasaan (*power*), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan, disamping karakteristik lembaga dan rezim serta izin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan.²⁰

Dengan demikian, konteks implementasi kebijakan baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa proses implementasi pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dan momentum dalam proses perumusan kebijakan selanjutnya, sebab berhasil tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya. Rumusan kebijakan yang telah dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa kalau tidak diimplementasikan. Oleh sebab itu, tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya.

Van Meter dan Van Horn, merumuskan mengenai proses implementasi sebagai “*those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*”. Makna perumusan di atas ialah bahwa implementasi mengandung pengertian tindakan yang dilakukan individu atau pejabat maupun swasta yang mengarah pada tujuan yang ditetapkan. Tindakan-tindakan tersebut adalah berupa upaya-upaya untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada

²⁰ Ibid, hlm. 84-85.

masyarakat. fokus perhatian implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program, dinyatakan berlaku.²¹

Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Menurut Lineberry ia mengemukakan bahwa implelementasi memiliki beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

- a. Pembentukan unit organisasi baru dan pelaksana
- b. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (standard operating procedures/SOP)
- c. Pengoordinasian berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam serta di antara dinas-dinas dan badan pelaksana.
- d. Pengalokasian sumber untuk mencapai tujuan. Komponen proses implelementasi seperti itu secara langsung berkaitan dengan hal-hal yang dianalisis oleh Mazmanian dan Sabatier. Mereka menjelaskan bahwa

²¹ Zulkarnaen Umar, "Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik Di Daerah", JAKPP, Edisi 1, Juni 2017, hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peroses impelementasi kebijakan publik harus diperhatikan dari sisi kontrol dan koordinasinya secara ketat untuk mencapai hasil.²²

Tachjan mengemukakan tahapan implementasi itu akan mencakup urutan-urutan atau langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merancang bangun (mendesain) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu.
2. Melaksanakan (mengaplikasikan) program, dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber lainnya, prosedur-prosedur, dan metode-metode yang tepat.
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan.²³

2. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. M. Irfan Islamy membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu Bersifat

1. *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.

²² Lim Walisman, *Kebijakan pendidikan dari filosofi ke implementasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 134.

²³ Tachjan, *Implementasi kebijakan Publik*, (Bandung: TRUENORTH, 2006), hlm. 35.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bersifat *non self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai²⁴

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut: Tahap (I) Terdiri atas kegiatan-kegiatan 15:

1. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas;
2. Menentukan standar pelaksanaan;
3. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap (II) Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode.

Tahap (III) Merupakan kegiatan-kegiatan :

1. Menentukan jadwal;
2. Melakukan pemantauan;
3. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.²⁵

Dengan demikian implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan pengawasan dan perencanaan penetapan waktu, dengan demikian dengan mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami

²⁴ M. Irfan, Islamy, .*Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1192), hlm. 102.

²⁵ Jhon Fresly Hutahayan, *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik*,(Jakarta: CV. BUDI UTAMA, 2019), hlm. 37.

apa yang senyatanya terjadi sesudah diberlakukan atau dirumuskan suatu program. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (target grup) tetapi juga memperhatikan berbagai kekuatan ekonomi, sosial, politik yang berpengaruh pada implemmentasi kebijakan negara.

3. Faktor-faktor Implementasi Kebijakan

Dalam bukunya Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi Jim Walisman menguraikan tentang beberapa pendekatan terhadap studi implementasi dari beberapa ahli. Berdasarkan latar belakang pendapat para ahli tersebut diatas, Edwards III tiba pada pendekatan yang dipilihnya, dengan terlebih dahulu mengemukakan 2 pertanyaan pokok yaitu :

- a. Hal-hal apa saja yang merupakan persyaratan bagi suatu implementasi yang berhasil ?
- b. Apa saja yang merupakan penghambat utama terhadap keberhasilan implementasi program ?²⁶

Melihat implementasi kebijakan radius zonasi sekolah Goerge C. Edward III menggunakan 4 indikator keberhasilan/ kegagalan implementasi kebijakan seperti apa yang telah di paparkannya.

²⁶ Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi*, (Bandung: CV. Pustaka, 2015), hlm. 138.

1. Komunikasi

Komunikasi, itu satu hal sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Implementasi efektif telah terjadi di kota bandung saat ini bagaimana koordianasi yang sangat baik dan setiap aparatur yang di tugaskan sangat nengetahui apa yang harus di kerjakan. sehingga setiap keputusan tepat, akurat, dan konsisten.

Secara fungsional, komunikasi dilakukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu dan terbagi menjadi:15

1. Komunikasi sosial

Melalui komunikasi, kita bekerja sama dengan anggota masyarakat (keluarga, kelompok belajar seperti sekolah dan perguruan tinggi, RT/RW, desa, kota, dan Negara secara keseluruhan) untuk mencapai tujuan bersama.

2. Komunikasi ekspresif

Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrument untuk menyampaikan perasaan-perasaan emosi. Perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan non verbal.

3. Komunikasi ritual

Erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif, komunikasi ritual biasanya dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas sering melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upacara-upacara seperti khitanan, pernikahan, ulang tahun, ruwat desa, dan lain-lain. Mereka yang berpartisipasi dalam bentuk komunikasi ritual tersebut, menegaskan kembali komitmen mereka pada tradisi-tradisi keluarga, komunitas, suku, bangsa, negara, ideologi, atau agama mereka.

4. Komunikasi instrumental

Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan.

Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum yakni menginformasikan (*to inform*), mengajar (*to educate*), mendorong (*to motivated*), mengubah; sikap, keyakinan, dan perilaku (*to influence*), serta menghibur (*to entertain*).

Terkadang, tanpa disadari keempat fungsi tersebut terkandung dalam suatu peristiwa dan saling tumpang tindih. Hanya saja, ada salah satu fungsi yang terlihat sangat mendominasi. Setiap orang dapat mengkonseptualisasikan dan mengembangkan fungsi komunikasi dalam kehidupan masing-masing.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka

tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran dan perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tangannya.

Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku rendah bahkan akan terjadi goal displacement yang dilakukan oleh pelaku terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sumber daya peralatan merupakan sumber daya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi, menurut Edward III yaitu:

“Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan

sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan”.

Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat di percaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Sumber daya informasi dan kewenangan juga menjadi faktor penting dalam implementasi, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan.

Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III menegaskan bahwa kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan dalam pelayanan publik melalui bagian pemerintahan umum dan di tunjuk kepada bidang bina kewilayahan sehingga bina kewilayahan membuat suatu staf operator yang khusus untuk menjalankan kebijakan tersebut, namun terlepas dari hal suatu kebijakan diharapkan membuat semua elemen di birokrasi aktif untuk menjalankan tugas masing-masing sebagai pelaksana kebijakan. Sebagai operator birokrasi yang di tugaskan di lapangan berperan aktif berpikir logis, berpikir kritis, dan berpikir kreatif dalam disposisi tugas tersebut.

Kemampuan berpikir logis meliputi kemampuan:

1. Menarik kesimpulan atau membuat, perkiraan dan interpretasi berdasarkan proporsi yang sesuai.
2. Menarik kesimpulan atau membuat perkiraan dan prediksi berdasarkan peluang.
3. Menarik kesimpulan atau membuat perkiraan atau prediksi berdasarkan korelasi antara dua variabel.
4. Menetapkan kombinasi beberapa variabel.
5. Analogi adalah menarik kesimpulan berdasarkan keserupaan dua proses
6. Melakukan pembuktian.
7. Menyusun analisa dan sintesa beberapa kasus.

Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan yang meliputi:

1. Menganalisis dan mengevaluasi argumen dan bukti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menyusun klarifikasi
3. Membuat pertimbangan yang bernilai,
4. Menyusun penjelasan berdasarkan data yang relevan dan yang tidak relevan Mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi;

Kemampuan berpikir kreatif meliputi kemampuan:

1. Kemahiran/ kelancaran: mencetuskan banyak ide, jawaban, cara atau saran penyelesaian masalah atau pertanyaan;
2. Kelenturan: menghasilkan gagasan, alternatif jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi; melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda; mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran.
3. Keaslian: melahirkan ungkapan yang baru dan unik; menyusun cara yang tidak lazim; membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dari bagian-bagiannya.
4. Elaborasi: mengembangkan suatu gagasan atau produk; memperinci detail-detail dari suatu obyek, gagasan, atau situasi sehingga menjadi lebih menarik.
4. Struktur birokrasi

Dalam penerapan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) sebenarnya tidak ada aturan baku yang dapat menunjang penerapan kebijakan tersebut contoh seperti *Standar Operating Prosedures* (SOP) tidak ada SOP yang khusus dalam penerapan kebijakan tersebut namun di lapangan kebijakan tersebut berjalan dengan baik dikarenakan komunikasi yang baik antara pimpinan dalam

hal ini Walikota Pekanbaru dengan bawahan menuntut birokrasi yang memiliki tanggung jawab moral, seperti semboyan yang birokrasi pegang penuh yaitu kerja ikhlas dan kerja cerdas. Yang hanya adalah SOP mengenai evaluasi kebijakan saja.²⁷

5. Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan yang senyatanya terjadi dapat mempengaruhi proses implementasi sebuah kebijakan

Prinsip pengelolaan lingkungan kebijakan suatu wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan empat indikator POAC yaitu Planning, Organizing, Actuating dan Controlling. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Planning atau Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang disusun dalam rangka pengelolaan lingkungan secara terpadu terhadap suatu wilayah;

2. Organizing (Pengorganisasian)

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan suatu wilayah secara efektif dan efisien, dalam arti masing-masing pihak yang terlibat dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab

3. Actuating (Pelaksanaan).

Pada tahap pelaksanaan, program-program yang dirancang harus menunjukkan adanya: optimisasi pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien, dorongan pelaksanaan konservasi sumberdaya alam

²⁷ Rizki Mulyadi dan Radhi Dharmansyah, "Penerapan Kebijakan E-Demokrasi"

Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Edisi 2, Mei 2017, hlm. 13.

dalam penambangan, meningkatnya peran stakeholders dan kelembagaan yang terlibat.

4. Faktor-faktor Pendukung / Menghambat Implementasi Kebijakan

Dapat disimpulkan bahwasanya faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan peraturan sebagai berikut :

1. Faktor komunikasi

komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin communicatio, dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Hal yang senada diungkapkan oleh Hafied Cangara, komunikasi berpangkal pada perkataan Latin communis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih.

Secara terminologi, para ahli komunikasi memberikan pengertian komunikasi menurut sudut pandang dan pendapat mereka masing-masing diantaranya: Danil Vardiasnyah mengungkapkan beberapa definisi komunikasi secara istilah yang dikemukakan para ahli :²⁸

- 1) Jenis & Kelly menyebutkan “Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya (khalayak)”.
- 2) Berelson & Stainer “Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan

²⁸ Dani Vardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Indeks, 2008), hlm. 25-26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain”.

- 3) Gode “Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula yang dimiliki oleh seseorang (monopoli seseorang) menjadi dimiliki dua orang atau lebih”
- 4) Brandlun “Komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego”
- 5) Resuch “Komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya dalam kehidupan”
- 6) Weaver “Komunikasi adalah seluruh prosedur melalui mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi pikiran orang lainnya”

2. Faktor sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaandalam mencapai tujuan organisasi. Sumbangan yang dimaksud adalah pemikiran dan pekerjaan yang mereka lakukan di berbagai kegiatan dalam perusahaan. Dalam pengertian sumber daya manusia, yang diliput bukanlah terbatas kepada tenaga ahli, tenaga pendidikan ataupun tenaga yang berpengalaman saja tetapi semua tenaga kerja yang digunakan perusahaan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya.²⁹

3. Faktor lingkungan kebijakan

²⁹ Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm.. 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lingkungan kebijakan merupakan usaha pemanfaatan sumberdaya, yaitu merupakan upaya mengeluarkan kebijakan yang efektif terhadap batas-batasan yang menjangkau semua kepentingan masyarakat (stakholder) yang berkaitan.

Sementara faktor pendukung dalam pengimplementasian suatu kebijakan antara lain:

1. Faktor disposisi

Menurut Sumarmo dalam Karunia, Dkk mengemukakan, bahwa disposisi matematis adalah keinginan, kesadaran, kecenderungan, dan dedikasi yang kuat pada diri siswa untuk berpikir dan berbuat secara matematis³⁰.

Disposisi, menurut Goerge C.Edward III (dalam Agustino), adalah :

- 1). Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

- 2). Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara

³⁰ Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan., *Penelitian Pendidikan Matematika*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2015), Hlm. 92

menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.³¹

2. Faktor struktur birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Struktur birokrasi ini mencakup aspek struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antar unit-unit organisasi, dan hubungan organisasi dengan organisasi di luar. Ada dua dimensi tentang struktur birokrasi, yaitu fragmentasi dan standar proses operasi (*standar operating procedure/ SOP*). Fragmentasi menyangkut struktur birokrasi yaitu semakin struktur terfragmentasi (lebih

³¹ Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 154.

panjang atau tersebar), maka akan terjadi distorsi komunikasi dan begitu sebaliknya. Sedangkan SOP menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok dan fungsi, kewenangan dan tanggung jawab diantara para pelaksana.

C. Konsep Pendekatan Implementasi

Pandangan Mazmanian dan Sabatier (1983: 5) adapun konsep mengenai konsep pendekatan implementasi terbagi kedalam dua perspektif implementasi kebijakan yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu politik merupakan yang merupakan cara alternatif dalam meng-implementasikan kebijakan atau program. Menurut perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan pada awalnya didasarkan pada bagaimana cara memenuhi aspek ketepatan dan keefisienan.

Namun demikian, pada akhir Perang Dunia II berbagai penelitian administrasi negara menunjukkan bahwa agen administrasi publik tidak hanya bekerja berdasarkan mandat resmi, akan tetapi juga karena tekanan dari kelompok kepentingan, anggota lembaga legislatif dan berbagai faktor dalam lingkungan politis. Sementara itu, perspektif ilmu politik yang mendapat dukungan dari pendekatan sistem politik memberikan perhatian pada bagaimana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh input dari luar arena administrasi, seperti ketentuan administratif, perubahan preferensi publik, teknologi baru dan preferensi

masyarakat. Perspektif ini terfokus pada pertanyaan dalam analisis implementasi, yaitu bagaimana konsistensi antara output kebijakan dengan tujuannya³²

D. Evaluasi / Dampak Implementasi Kebijakan

Dampak dari suatu kebijakan merupakan salah satu dari lingkup studi analisis kebijakan dan telaah mengenai dampak atau evaluasi kebijakan yaitu dimaksudkan untuk mengkaji akibat-akibat yang ditimbulk suatu kebijakan, atau dengan kata lain untuk mencari jawaban apa yang terjadi sebagai akibat dari implementasi kebijakan membahas “hubungan antara cara-cara yang digunakan dan hasil yang dicapai.

Setidaknya keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup : 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; 2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, 3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; 4) apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup : 1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; 2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; 3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.³³

³² Asna Aneta, “Implementasi Kebijakan”, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010. Hlm. 60.

³³ Merile S. Grindle, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), hlm. 21.

Dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan maka tantangan-tantangan tersebut harus dapat teratasi sedini mungkin. Pada suatu sisi lain bahwa untuk mencapai keberhasilannya ada banyak variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy make* runtuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah.

Evaluasi kebijakan publik juga merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienan suatu kebijakan.

Evaluasi ini tentu ada fungsi dan tujuan, salah satunya sebagai monitor dari kebijakan yang telah dilaksanakan agar kedepannya dapat menjadi lebih baik. Sedangkan menurut pendapat dari Guba dan Lincoln dalam Wahab ada lima fungsi penting dari evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Evaluasi mengemban fungsi Evaluasi sebagai kemudi dan manajemen.
2. Evaluasi sebagai fungsi kontrol dan inspeksi.
3. Evaluasi sebagai fungsi akuntabilitas.
4. Evaluasi sebagai fungsi kepenasehatan.³⁴

³⁴ Muhammad Wirawan, "Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan", Jurnal Administrasi Publik, Edisi 2013, hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wibawa juga mengungkapkan dalam buku Edi Handoko setidaknya ada empat fungsi evaluasi kebijakan publik.

Pertama, eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat juga dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan dimensi realitas yang diamati. Dari kegiatan ini, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan actor yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan suatu kebijakan.

Kedua, kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang diambil para pelaku kebijakan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan kebijakan atau tidak.

Ketiga, audit. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan atau tidak.

Keempat, akunting. Dari evaluasi yang telah dilaksanakan dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan yang diterapkan.

E. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Kebijakan pendidikan harus sejalan dengan kebijakan publik. Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa di bidang pendidikan, sebagai satu dari tujuan bangsa secara keseluruhan.

Kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan.

Kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Isu ini menjadi penting dengan meningkatnya kritisi publik terhadap biaya pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan secara keseluruhan

Kebijakan sekolah yang menerapkan PPDB melalui sistem radius Zonasi dapat dilihat pada rumusan pengertian sekolah yang menerapkan PPDB melalui radius Zonasi, landasan hukum dan elemen-elemen yang menyertainya.

1. Pengertian Sekolah Sistem Radius Zonasi

Penerimaan Peserta Didik Baru yang familiar dengan akronim PPDB adalah penerimaan peserta didik untuk jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP dan SMA yang dilaksanakan pada awal tahun pelajaran baru. PPDB jenjang SMA dilakukan secara online. Seleksi dilakukan melalui sistem zonasi. PPDB kota Pekanbaru mengusung asas objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam implementasinya sejak tahun ajaran 2017/2020 kota Pekanbaru telah menerapkan sistem zonasi, yaitu sistem penerimaan peserta didik berdasarkan radius dan jarak. Melalui sistem zonasi ini diharapkan semua warga kota Pekanbaru bisa mendapatkan pendidikan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal.

Tidak terkecuali anak-anak dari kalangan RMP (rawan melanjutkan pendidikan) yang memiliki kelemahan secara ekonomi, agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah. Kelebihan sistem zonasi ini menurut Dinas Pendidikan adalah pemerataan pendidikan, lebih hemat waktu karena sekolah dekat, lebih hemat biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih bugar, serta mengurangi kemacetan. Namun dalam implementasinya kebijakan PPDB di kota Pekanbaru selalu menuai konflik dan protes dari masyarakat yang merasa dirugikan, baik masyarakat yang mendaftarkan anaknya ke SMA maupun penyelenggara pendidikannya, yaitu guru SMA Negeri dan Swasta.

2. Kebijakan Pemerintah tentang / Landasan Hukum

Sistem Zonasi

Pasal 16

1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

- 2) *Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.*
- 3) *Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:*
- a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut;*
 - b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.*
- 4) *Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/ kelompok kerja kepala Sekolah.*
- 5) *Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/ kabupaten/ kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.*
- 6) *Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:*
- a. Jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan*
 - b. Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima³⁵

Dengan demikian peneliti menyimpulkan setidaknya ada tiga indikator yang diatur oleh pemerintah dalam UU sistem zonasi PPDB (penerimaan peserta didik baru) pasal 16 yaitu:

1. Calon peserta didik yang berdomisili pada radius zonasi terdekat sesuai KK (kartu keluarga) sekolah harus menerima paling sedikit 90% dari jumlah calon peserta didik keseluruhan.
2. Jalur prestasi yang berdomisili di luar zonasi sekolah paling banyak 5% dari keseluruhan calon peserta didik.
3. Jalur dengan alasan tertentu (perpindahan domisili wali siswa, bencana, social dan lain-lain) paling banyak 5% dari keseluruhan calon peserta didik.

Seiring dengan keluarnya UU terkait sistem zonasi Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sekjen Kemendikbud) Didik Suhardi mengungkapkan bahwa sistem zonasi bukan hanya diterapkan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Persoalan zonasi ini disampaikan Didik dalam acara Lokakarya Peningkatan Motivasi dan Kerja Sama Sumber Daya Manusia, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/10/2018).

1. Pemerataan kualitas pendidikan

Ia menuturkan, zonasi adalah suatu kebijakan untuk mempercepat pelaksanaan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Tanah Air. Sekjen

³⁵ PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018.

Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan, Kemendikbud memfokuskan sistem zonasi di daerah yang belum memiliki sekolah berkualitas. Didik kembali menegaskan bahwa zonasi bukan hanya untuk PPDB, melainkan untuk keseluruhan program yang tujuan utamanya mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, maupun pendidikan masyarakat.

Terkait dengan pemerataan pendidikan merujuk pada laporan UNDP yang melaporkan bahwa angka *Human Development Index* (HDI) masyarakat Indonesia yang menjadi salah satu indikator pemerataan di Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Lebih ironis lagi jika mencermati angka putus sekolah masyarakat Indonesia. Komnas Perlindungan Anak (KPA) melaporkan bahwa jumlah anak putus sekolah pada tahun 2007 mencapai 11,7 juta jiwa. Angka tersebut bertambah cukup fantastik, mengingat satu tahun sebelumnya, tahun 2006 jumlahnya masih sekitar 9,7 juta anak.³⁶

Pada sisi ini, sepintas dapat dipahami bahwa selama ini belum semua masyarakat bangsa Indonesia dapat merasakan manisnya pendidikan. Jika hendak dicermati, maka persoalan pemerataan pendidikan setidaknya disebabkan oleh

1. Perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat;
2. Perbedaan fasilitas pendidikan
3. Sebaran sekolah tidak merata;
4. Nilai masuk sebuah sekolah dengan standart tinggi;

³⁶ Muhammad Idrus, "Mutu Pendidikan Dan Pemerataan Pendidikan Di Daerah", , PSIKOPEDAGOGIA Edisi 2, Desember 2012, Hlm. 15.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Rayonisasi.

Harus diakui, karena tingkat ekonomi masyarakat yang rendah, maka peluang untuk memperoleh akses pendidikan akan semakin mengecil. Tentunya hal ini berbeda dengan mereka yang memiliki kemampuan bayar tinggi, dapat memilih model dan jenis pendidikan yang disukai. Bukan hanya sekolah reguler saja, tetapi sekolah dengan taraf internasional pun dapat diperoleh dengan mudah.

Hal yang demikian juga di ungkapkan oleh penelitian indeks daya saing global bahwa dari beberapa Negara-Negara tetangga Indonesia memiliki daya saing yang rendah di dibandingkan dengan Singapu, Malaisia, Brunai Darussalam dan Negar-negara lainnya, sebagai mana yang di gambarkan diagram berikut ini:



Oleh sebab itu dengan adanya kebijakan yang dilakukan Pemerintah diharapkan akan terjadi percepatan-percepatan dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, dan diharapkan akan meningkatkan daya saing SDM (sumber daya manusia) yang ada.

2. Menciptakan banyak sekolah favorit

“Sistem zonasi kita fokuskan untuk daerah-daerah yang di zonasi itu tidak ada sekolah yang berkualitas. Tapi ini masih digodok belum selesai,” ujarnya. Baca juga: Guru Bahasa Diminta Kembalikan Tradisi Bersastra Didik menambahkan, Kemendikbud harus menciptakan lebih banyak lagi sekolah favorit, dengan menerapkan program interferensi dalam peningkatan pendidikan. “Tentu dengan zonasi nanti harapannya sekolah favorit itu ada di setiap zonasi, bukan hanya di tempat-tempat tertentu. Di semua zonasi harapannya adalah sekolah favorit. Tentu kita akan mempercepat di setiap zona ini ada sekolah yang berkualitas. Jadi sekolah kualitas itu ada di mana-mana,” tutur Didik.

3. Peningkatan kualitas guru

“Makanya diperlukan program intervensi. Intervensi bisa dalam bentuk program peningkatan kualitas guru, peningkatan sarana prasarana, perbaikan proses belajar mengajar, perbaikan kegiatan kesiswaan, dan lain-lain,” ujarnya. Menurut Didik, harus ada intervensi terhadap sekolah-sekolah, yakni sekolah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana saja yang sudah mendekati Standar Nasional Pendidikan (SNP). “Dan itu yang akan diintervensi sehingga ada sekolah bagus di setiap zona,” tuturnya.³⁷

Terkait dengan guru yang berkualitas Davis dan Tomas menggambarkan guru yang berkualitas adalah guru yang profesional, kompeten, dan efektif, ada beberapa ciri guru yang efektif sebagai berikut:³⁸

- Memiliki kemampuan yang terkait dengan iklim kelas seperti:
 - memiliki kemampuan interpersonal, khususnya kemampuan untuk menunjukkan empati, penghargaan kepada siswa, dan ketulusan;
 - memiliki hubungan baik dengan siswa;
 - secara tulus menerima dan memperhatikan siswa;
 - menunjukkan minat dan antusias yang tinggi dalam mengajar;
 - mampu menciptakan atmosfir untuk bekerja sama dan kohesivitas dalam mengajar.
 - melibatkan siswa dalam mengorganisasikan dan merencanakan kegiatan pembelajaran
 - mampu mendengarkan siswa dan menghargai hak siswa untuk berbicara dalam setiap diskusi; dan). meminimalkan friksi-friksi dikelas jika ada.
- Memiliki kemampuan yang terkait dengan strategi manajemen seperti:

³⁷ <https://edukasi.kompas.com/read/2018/10/15/18530531/tenyata-ini-3-tujuan-zonasi-selain-untuk-ppdb>. (16/03/2020), PKL. 22.00.

³⁸ Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan Indonesia Memasuki Millenium III*, (Yogyakarta: Adi Cita, 2000), .hlm. .28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. memiliki kemampuan secara rutin untuk menghadapi siswa yang tidak memiliki perhatian, sukamenyela, mengalihkan pembicaraan, dan mampu memberikan transisi dalam mengajar;.
 - b. mampu bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan tingkat berpikir yang berbeda.
- 3) Memiliki kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan balik dan penguatan (reinforcement), yaitu:
- a. mampu memberikan umpan balik yang positif terhadap respons siswa
 - b. mampu memberikan respons yang membantu kepada siswa
 - c. mampu memberikan tindak lanjut terhadap jawaban yang kurang memuaskan.
 - d. mampu memberikan bantuan kepada siswa yang diperlukan.
- 4) Memiliki kemampuan yang terkait dengan peningkatan diri, antara lain:
- a. mampu menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif
 - b. mampu memperluas dan menambah pengetahuan metode-metode pengajaran.
 - c. mampu memanfaatkan perencanaan kelompok guru untuk menciptakan metode pengajaran.

Oleh sebab itu guru profesional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode, rasa tanggung jawab, pribadi, sosial, intelektual, moral

dan spiritual, dan kesejawatan, yaitu rasa kebersamaan di antara sesama guru pribadi. Sementara itu, perwujudan unjuk kerja profesional guru ditunjang dengan jiwa profesionalisme yaitu sikap mental yang senantiasa mendorong untuk mewujudkan diri sebagai guru profesional.

F. Kendala pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB di SMA 14 Kota Pekanbaru

Implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB memang bisa dikatakan sudah berjalan efektif namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya pasti mengalami beberapa kendala yang harus dihadapi.

Sukses dan tidaknya sebuah implementasi kebijakan dapat dilihat dari faktor penyebab gagalnya implementasi kebijakan tersebut yang diindikasikan sebagai faktor kendala implementasi kebijakan, apabila pihak yang melaksanakan kebijakan tidak dapat melaluinya. Kendala yang dihadapi pada implementasi sistem zonasi adalah kurang pahaman wali murid terhadap sosialisasi mengenai sistem zonasi yang telah disosialisasikan oleh dinas pendidikan ataupun pihak sekolah dalam hal ini panitia PPDB. Kurang pahaman wali murid tersebut karena latar belakang pendidikan wali murid yang berbeda-beda.

Hal ini telah diungkapkan oleh Fowler bahwa “*implementers frequently do not understand what they are supposed to do*” yang artinya bahwa implementor seringkali tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan.³⁹

Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya sosialisasi, pengarahan serta bimbingan mengenai implementasi kebijakan zonasi kepada wali murid. Selain itu

³⁹ Elsa Nida Pangaribuan, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP di Kabupaten Gresik”, elsapangaribuan @mhs.unesa.ac.id.

kendala secara teknis yaitu daya tampung server yang masih minim untuk bisa diakses secara bersamaan di seluruh wilayah Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Bukit Raya, sehingga mempengaruhi kecepatan saat mengakses halaman website.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB di Kota Pekanbaru pada umumnya dan pada khususnya di Kecamatan Bukit Raya adalah mensosialisasikan sistem zonasi lebih awal dengan sejelas-jelasnya untuk menanamkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem zonasi kepada wali murid.

G. Pengertian Mutu Pendidikan

Pengertian mengenai mutu pendidikan mengandung makna yang berlainan. Namun, perlu ada suatu pengertian yang operasional sebagai suatu pedoman dalam pengelolaan pendidikan untuk sampai pada pengertian mutu pendidikan, kita lihat terlebih dahulu pengertian mutu pendidikan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, keadaan, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya).⁴⁰

Mutu pendidikan terdiri dari kata mutu dan pendidikan. Mutu dalam bahasa arab “حسن” artinya baik⁴¹, dalam bahasa Inggris “quality artinya mutu, kualitas”⁴².

⁴⁰ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 10 (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), hlm. 677.

⁴¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : (Bandung : Al-Ma’arif, 1984), hlm. 110.

⁴² John M. Echolis, Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1988), hlm. 460.

Secara istilah mutu adalah “Kualitas memenuhi atau melebihi harapan pelanggan”⁴³. Dengan demikian mutu adalah tingkat kualitas yang telah memenuhi atau bahkan dapat melebihi dari yang diharapkan.

Pendidikan menurut Imam Al-Ghazali adalah “Sebuah wasilah untuk mencapai kemuliaan dan menyerahkan jiwa untuk mendekat diri kepada Tuhan”⁴⁴.

Berdasarkan Undang Undang Sisdiknas No. II Tahun 2003 pendidikan adalah :

*Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.*⁴⁵

Secara singkat Edward Sallis mengemukakan mutu sebagai sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan kebutuhan pelanggan. Defenisi ini disebut juga dengan istilah (*quality in perception*). Suatu lembaga dapat dikatakan bermutu sesuai dengan pandangan para pelanggannya. Ini merupakan defenisi yang tidak boleh diabaikan, karena pelanggan merupakan pembuat keputusan terhadap mutu dalam hal ini yaitu masyarakat ebai input pendidikan. Masyarakat

⁴³ M.N. Nasution, Manajemen Mutu terpadu, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), Cet. ke-3, h. 15

⁴⁴ Muhammad Utsman el-Muhammady, *Pemurnian Tasawuf oleh Imam Al Ghazali*, www.Scribd.com/doc/2917072/ tgl. 16 Oktober 2020.

⁴⁵ Tim Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Sisdiknas 2003, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 2.

tersebut melakukan penilaian berdasarkan produk yang dihasilkan oleh suatu lembaga atau instansi.⁴⁶

Secara luas mutu dapat diartikan sebagai agregat karakteristik dari produk atau jasa yang memuaskan kebutuhan konsumen/pelanggan. Karakteristik mutu dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam pendidikan, mutu adalah suatu keberhasilan proses belajar yang menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Pelanggan bisa berupa mereka yang langsung menjadi penerima produk dan jasa tersebut atau mereka yang nantinya akan merasakan manfaat produk dan jasa tersebut.⁴⁷

Dalam hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah pada Q.S: Ar-Ra'du Ayat 11 :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِّنْ وَّالٍ

Artinya: Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki

⁴⁶ Edward Sallis, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*, (Jokjakarta: IRCiSoD, 2011), hlm. 56.

⁴⁷ Ravik Karsidi, *Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan Teknologi Belajar Jarak Jauh*, Makalah Disampaikan dalam Seminar Regional Unit Pelaksana Belajar Jarak Jauh – Universitas Terbuka, (Solo: 28 Mei 2005). Hlm. 45.

keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.⁴⁸

Dedi Mulyasana mengemukakan pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidak mampuan, ketidak berdayaan, ketidak benaran, ketidak jujur, dan dari buruknya ahklak dan keimanan.⁴⁹

Menurut Oemar Hamalik, Pengertian mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu segi normatif dan segi deskriptif. Dalam artian normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan (kriteria) intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan yakni manusia yang terdidik sesuai dengan standar ideal.

Menurut Nur Azman, mutu atau kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu, kadar. Juga bisa berarti derajat atau taraf kepandaian, kecakapan, dan sebagainya.⁵⁰ Secara umum kualitas atau mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat.⁵¹ Dalam pengertiannya mutu mengandung makna derajat (tingkat keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang tangible atau intangible.

⁴⁸ Depag, *RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 73.

⁴⁹ Dedy Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, (Bandung, PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015), hlm. 121.

⁵⁰ Nur Azman, *Kamus Standar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, 2013), hlm. 227.

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Konsep Dasar*, (Jakarta: Ditjend Pendidikan Dasar dan Menengah, 2012), hlm. 28.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mutu yang tangible artinya dapat diamati dan dilihat dalam bentuk kualitas suatu benda atau dalam bentuk kegiatan dan perilaku. Misalnya televisi yang bermutu karena mempunyai daya tahan (tidak cepat rusak), warna gambarnya jelas, suara terdengar bagus, dan suku cadangnya mudah didapat, perilaku yang menarik, dan sebagainya. Sedangkan mutu yang intangible adalah suatu kualitas yang tidak dapat secara langsung dilihat atau diamati, tetapi dapat dirasakan dan dialami, misalnya suasana disiplin, keakraban, kebersihan dan sebagainya.⁵²

Sedangkan menurut Carvin, sebagai mana dikutip oleh Nasution,⁵³ mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Selera atau harapan pelanggan pada suatu produk selalu berubah, sehingga kualitas produk juga harus berubah atau disesuaikan.

Charles Hoy dalam bukunya *Improving Quality in Education*, mendefinisikan tentang kualitas dalam pendidikan dengan suatu rumusan :

*Quality in education is an evaluation of the process of educating which enhances the need to achieve and develop the talents of customers of the process, and at the same time meets the accountability standards set by the clients who pay for the process or the outputs from the process of educating*⁵⁴

⁵² B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 52.

⁵³ Nasution. *Manajemen Mutu Terpadu (total Quality management)*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 16.

⁵⁴ Charles Hoy, dkk., *Improving Quality in Education*. (London: Kogan Page, 2000), hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian mutu dalam pendidikan sebagaimana pandangan Aspin tersebut menunjukkan sesungguhnya berkaitan erat dengan norma-norma yang mencerminkan keinginan institusi dengan titik fokusnya pada aspek pendidikan tertentu. Semua aktivitas yang berkaitan dengan pengajaran, pembelajaran, perbaikan struktur dan fungsi organisasi diarahkan untuk memenuhi kepuasan tuntutan eksternal.

Berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik, tenaga kerja yang terlatih. Dalam artian deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan hasil tes prestasi belajar.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pada tanggal 25 September 2009 yang lalu, pemerintah melalui Mendiknas telah menerbitkan Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang system Penjaminan Mutu Pendidikan.

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan program pendidikan, Pemerintah Daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui SPMP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan tujuan antara yang hendak dicapai melalui sistem penjaminan mutu pendidikan ini adalah terbangunnya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, meliputi:

1. Terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, non formal, dan informal
2. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, Pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah.
3. Ditetapkan secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal.
4. Terpetakannya secara nasional mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten atau kota, dan satuan atau program pendidikan.
5. Terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah.

Paradigma Penjaminan Mutu Pendidikan yang dikembangkan adalah:

1. Pendidikan untuk semua yang bersifat inklusif dan tidak mendiskriminasi peserta didik atas dasar latar belakang apapun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Pendidikan sepanjang hayat berpusat pada peserta didik yang memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi insan pembelajar mandiri yang kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan.
3. Pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan pembangunan berkelanjutan (*education for sustainable development*), yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didik menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Penjaminan mutu pendidikan dilakukan atas dasar prinsip:

1. Keberlanjutan
2. Terencana dan sistematis, dengan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yang jelas dan terukur dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan non formal.
3. Menghormati otonomi satuan pendidikan formal dan non formal.
4. Memfasilitasi pembelajaran formal masyarakat berkelanjutan dengan regulasi Negara seminimal mungkin.
5. SPMP merupakan sistem terbuka yang terus disempurnakan secara berkelanjutan.⁵⁵

Untuk mengukur mutu atau kualitas pendidikan memerlukan pandangan yang komprehensif, dengan demikian ada beberapa elemen yang dipandang penting

⁵⁵ Permendiknas No. 63 Tahun 2009.

harus diperhatikan, bahwa sesuatu dikatakan berkualitas sapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:⁵⁶

1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan
2. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan
3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (apa yang dianggap berkualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada saat yang akan datang)
4. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melampaui harapan.

Dengan paradigma tersebut, maka dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup mutu *Input*, proses, *Output*, dan *outcome*. Dengan demikian maka kualitas pendidikan dapat diartikan “*renewed emphasis on school process*” (Penekanan baru pada proses Sekolah).

Antara proses dan pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar proses itu tidak salah arah, maka mutu dalam arti hasil output harus dirumuskan terlebih dahulu oleh sekolah, dan jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun kurun waktu tertentu. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu hasil output yang ingin dicapai. Adapun instrumental input, yaitu alat berinteraksi dengan raw input (siswa) seperti guru yang harus memiliki komitmen yang tinggi dan total serta kesadaran untuk berubah dan mau berubah

⁵⁶ Fandi Tjoptono dkk., *Total Quality Management*, (Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2033), hlm. 3-4.

untuk maju, menguasai ajar dan metode mengajar yang tepat, kreatif, dengan ide dan gagasan baru tentang cara mengajar maupun materi ajar, membangun kenerja dan disiplin diri yang baik dan mempunyai sikap positif dan antusias terhadap siswa, bahwa mereka mau diajar dan mau belajar.

Kemudian sarana dan prasarana belajar harus tersedia dalam kondisi layak pakai, bervariasi sesuai kebutuhan, alat peraga sesuai dengan kebutuhan, media belajar disiapkan sesuai kebutuhan. Biaya pendidikan dengan sumber dana, budgeting, kontrol dengan pembukuan yang jelas. Kurikulum yang memuat pokok-pokok materi ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, realistik, sesuai dengan fenomena kehidupan yang sedang dihadapi. Tidak kalah penting metode mengajar pun harus dipilih secara variatif, disesuaikan dengan keadaan, artinya guru harus menguasai berbagai metode. Begitu pula dengan raw input dan lingkungan, yaitu siswa itu sendiri. Dukungan orang tua dalam hal ini memiliki kepedulian terhadap penyelenggaraan pendidikan, selalu mengingatkan dan peduli pada proses belajar anak di rumah maupun di sekolah.

H. Standar Proses Pendidikan

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, ditegaskan bahwa “standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan”. Selanjutnya dalam peraturan menteri pendidikan Nasional republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan

pendidikan dasar dan menengah di kemukakan bahwa “Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Dasar hukum dilaksanakannya standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
3. Peraturan Presiden nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan Organisasi, dan tatakerja kementerian Negara republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

Sesuai dengan alamat peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran

pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester.

Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksanakannya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

1. Perencanaan Proses Pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

a. Silabus

Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar isi (SI) dan standar kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan penyusunan Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para

guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah/madrasah atau beberapa sekolah, kelompok masyarakat guru Mata pelajaran (MGMP) atau Pusat kegiatan guru (PKG) dan Dinas Pendidikan. Pengembangan silabus disusun di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP, dan Dinas Provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SMP dan SMK, serta departemen yang menangani urusan pemerintahan di Bidang agama untuk MI, MTs, MA dan MAK.

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.

RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.

Komponen RPP adalah :

1. Identitas mata pelajaran

Identitas mata pelajaran, meliputi : satuan pendidikan, kelas, semester, program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertemuan.

2. Standar Kompetensi

Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran.

3. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran.

4. Indikator pencapaian kompetensi

Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan cara kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap keterampilan.

5. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.

6. Materi Ajar

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencapaian kompetensi.

7. Alokasi Waktu

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar.

8. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran digunakan oleh guru mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik digunakan untuk peserta didik kelas 1 sampai kelas 3 SD/MI.

9. Kegiatan Pembelajaran

1. Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

2. Inti

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi.

3. Penutup

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik dan tindak lanjut.

10. Penilaian hasil belajar

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi.

I. Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Mutu

Dalam peningkatan mutu pendidikan dipengaruhi oleh input dan faktor proses manajemen pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses. Input pendidikan terdiri dari seluruh sumber daya sekolah menurut Subagio terdiri dari man, money, policy.⁵⁷

Dari pengertian diatas maka input pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi mutu dapat berupa

1. Sumber daya manusia sebagai pengelola sekolah terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah merupakan guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala.
 - b. Guru merupakan adalah pendidik professional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan dan melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.
 - c. Tenaga kependidikan.

2. Sarana prasarana

Sarana prasarana pendidikan merupakan media belajar atau alat bantu yang pada hakikatnya akan lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran.⁵⁸

3. Kesiswaan

Siswa sebagai peserta didik merupakan salah satu input yang turut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Penerimaan siswa berdasarkan pada kriteria yang jelas transparan dan akuntabel. Pembiayaan Salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap

⁵⁷ Subagio Atmodiwirio, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Ardadizya Jaya, 2002), hlm. 22.

⁵⁸ Oemar Hamalik, *Evaluasi Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 22..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan adalah pembiayaan pendidikan yang memadai. Sekolah harus memiliki dana yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu pembiayaan harus dikelola secara transparan.

B. Pendukung dan Penghambat Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam meningkatkan mutu pendidikan, agar supaya upaya-upaya dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan dapat terukur dengan baik.

1. Pendukung dalam peningkatan mutu pendidikan

Adapun hal-hal yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah secara garis besar terdapat dari: kerjasama tim (*Team Work*) dan keterlibatan stakeholders.

1) Kerjasama Tim (Team Work).

Kerjasama tim merupakan unsur yang sangat penting dalam Manajemen Mutu Terpadu. Tim adalah sekelompok orang bekerja secara bersama-sama dan memiliki tujuan bersama yaitu untuk memberikan kepuasan kepada seluruh stakeholders. Kerja tim dalam sebuah organisasi merupakan komponen penting dalam TQM, mengingat kerja tim akan meningkatkan kepercayaan diri, komunikasi dan mengembangkan kemandirian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerjasama tim dalam menangani proyek perbaikan atau pengembangan mutu pendidikan merupakan salah satu bagian dari pemberdayaan (*empowerment*) pegawai dan kelompok kerjanya dengan pemberian tanggung jawab yang lebih besar. Eksistensi kerjasama dalam sebuah lembaga pendidikan sebagai modal utama dalam meraih mutu dan kepuasan stakeholders melalui proses perbaikan mutu secara berkesinambungan.

Ada tiga komponen saling berkaitan yang mempengaruhi kinerja dalam produktifitas suatu tim dan ini merupakan kunci keberhasilan tim, yaitu sebagai berikut:

- a. Organisasi secara keseluruhan
 - b. Tim Kerja
 - c. Para individu anggota tim
- 2) Keterlibatan stakeholders.

Misi utama dari Manajemen Mutu Terpadu adalah untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan seluruh pelanggan. Sekolah yang baik adalah sekolah yang mampu menjaga hubungan dengan pelanggannya dan memiliki obsesi terhadap mutu. Pelanggan sekolah ada dua macam:

- a. Pelanggan Internal : guru, pustakawan, laborat, teknisi dan administrasi.
- b. Pelanggan Eksternal terdiri dari:
 - a) Pelanggan primer : siswab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Pelanggan sekunder: orang tua, pemerintah dan masyarakat.
- c) Pelanggan tertier : pemakai/penerima lulusan (perguruan tinggi dan dunia usaha).

Menurut Syafaruddin upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu dilakukan hal-hal berikut, yaitu:

1. Menyamakan komitmen mutu atau mutu oleh kepala sekolah, para guru dan pihak terkait (*stakeholders*), mencakup: visi, misi, tujuan dan sasaran,
2. Mengusahakan adanya program peningkatan mutu sekolah (kurikulum/pengajaran, pembinaan siswa, pembinaan guru, keuangan, saran dan prasarana, serta kerjasama dengan *stakeholders* sekolah, meliputi jangka panjang dan jangka pendek
3. Meningkatkan pelayanan administrasi sekolah,
4. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif
5. Ada standar mutu lulusan
6. Jaringan kerjasama yang baik dan luas
7. Penataan organisasi sekolah yang baik (tata kerja),
8. Menciptakan iklim dan budaya sekolah yang kondusif.⁵⁹

⁵⁹ Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan Konsep, Strategi, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm 290.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penghambat Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas tentu tidak berjalan tanpa adanya hambatan.

a. Hambatan Internal Hambatan internal yang dialami Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Beberapa ketercapaian indikator kinerja bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi melainkan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota seperti pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
2. Rendahnya mutu pembelajaran yang disebabkan kurang efektifnya pembelajaran dan pengajaran
3. Mahalnya biaya pendidikan namun tidak diimbangi dengan mutu pembelajaran
4. Adanya kegiatan program peningkatan mutu pendidikan yang pelaksanaannya tidak optimal, bahkan tidak terlaksana samasekali seperti kegiatan pelatihan kompetensi tenaga pendidik

b. Hambatan Eksternal Sedangkan hambatan bersifat eksternal yang masih dihadapi dalam peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Penduduk Riau belum 100% melek huruf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Permasalahan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan kesesuaian serta daya saing Pendidikan Menengah Atas yang belum memadai yang disebabkan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan
2. Rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat
3. Belum meratanya fasilitas dan standar sarana prasarana pendidikan menengah
4. Belum optimalnya pembinaan kesiswaan yang mengakibatkan rendahnya ranking prestasinasional
5. Belum meratanya distribusi guru mata pelajaran di kabupaten/ kota Provinsi Riau
6. Masih sedikitnya tenaga pendidikan yang berkualifikasi S2⁶⁰

C. Penelitian Relevan

Menurut sepengetahuan peneliti, setelah dilakukan kajian pustaka terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, belum ditemukan adanya penelitian yang berkaitan dengan Analisis Kebijakan Implementasi Sistem Zonasi Terhadap Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah Awal Negeri 14 Kota Pekanbaru. Akan tetapi peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Diantara hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

⁶⁰ Maria Angelia Silalahi, dkk, *Tugas Dan Wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas* (Diponegoro Law Journal Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019).

1. Penelitian yang dilakukan Eka Reza Khawdomi. Yang berkaitan dengan “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah”, Penelitian ini menganalisis tentang kebijakan sistem zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Lampung Tengah.

Pada penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu secara normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Kabupaten Lampung Tengah yaitu : Dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Lampung Tengah masih mengacu pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 karena belum adanya Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati Lampung Tengah. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah tentang Petunjuk teknik pelaksanaan PPDB yang memuat sistem zonasi mengatur tentang PPDB dengan memprioritaskan calon siswa yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan kuota 90% tetapi sekolah wajib menerima 20% keluarga dengan ekonomi tidak mampu dari 90% dari total kuota penerimaan, kemudian 5% dari pemindahan KK dengan alasan khusus dan 5% dari calon siswa berprestasi.

Pelaksanaan PPDB sistem zonasi jenjang TK dan SD melalui kriteria dengan urutan prioritas dari usia kemudian radius zona dan untuk jenjang SMP juga melalui kriteria urutan prioritas yaitu radius zona kemudian nilai hasil ujian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tertera dalam ijazah ataupun surat tanda tamat belajar. Penerimaan jenjang SMP diberikan penskoran atau tambahan nilai terhadap calon siswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik. Petunjuk teknis PPDB Lampung Tengah juga mengatur tentang rombongan belajar setiap sekolah untuk jenjang SD dan SMP. Selanjutnya, Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru adalah sebagai berikut : Belum adanya Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati Lampung Tengah mengenai PPDB sistem zonasi.

Belum maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan PPDB seperti sosialisasi mengenai ketentuan radius zona atau yang disebut dengan sistem zonasi. Belum adanya kebijakan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah terhadap pemerataan tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta sarana dan prasarana sebagai tindak lanjut dari tujuan sistem zonasi ini yaitu pemerataan mutu pendidikan. Masih kurangnya pengawasan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah terhadap sekolah dalam PPDB sistem zonasi dan tidak adanya tindakan tegas seperti sanksi pidana oleh aparat yang berwenang kepada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran karena sejauh ini pelanggaran-pelanggaran tersebut hanya dijatuhkan sanksi administratif.⁶¹

2. Ratih Fenty A. Bintoro “Jurnal Riset Pembangunan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan

⁶¹ Khawdomi Eka, Skripsi : “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah”, (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2019), hlm. 69-71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Timur. Dengan judul “Presepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda” Penelitian dalam jurnal riset pembangunan ini menganalisis terkait dengan Presepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penjelasan (explanatory). Kemudian untuk hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa terkait dengan penerapan sistem zonasi sekolah pada tahun 2017/2018 didapatkan hasil adanya kekhawatiran akan tertutupnya kemungkinan untuk bersekolah di luar zonasi. Kekhawatiran ini dinilai tidak beralasan karena pada dasarnya ketentuan zonasi ini tidak lantas menutup peluang murid untuk bersekolah di sekolah yang diinginkannya hanya karena berbeda zonasi, masih tetap terbuka peluang untuk mendaftar di jalur lintas zona ataupun jalur prestasi. Selanjutnya, kurangnya sosialisasi kebijakan zonasi, dalam hal ini tidak semua masyarakat paham mengenai tujuan dan aturan pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah tersebut sehingga menimbulkan kebingungan. Dan yang terakhir adanya kekhawatiran perihal standar pendidikan yang tidak merata, pemberlakuan kebijakan zonasi bertujuan untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas, namun terdapat beberapa kekhawatiran mengenai tepat atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidaknya kebijakan ini di terapkan, karena apabila ditelusuri masih banyak standar nasional pendidikan yang masih belum memenuhi standar.⁶²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Edi Purwanto dengan judul “Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Di Islamic International School SD Plus Darul Ilmi Murni Namorambe” pada penelitian ini Edi Purwanto mencoba bagaimana upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan terkhusus pada Islamic International School SD Plus Darul Ilmi Murni, yang menjadi lokasi penelitian ini. Dalam penelitian ini, lebih spesifik bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian serta upaya pelaksanaan manajemen peningkatan mutu pendidikan pada lokasi penelitian.⁶³

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menginterpretasikan penelitian ini, peneliti perlu mengemukakan akan beberapa hal agar dapat dipahami secara kongkrit dan lebih kooperasional. Kebijakan Implementasi sistem radius zonasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan individu atau pejabat maupun swasta yang mengarah kepada tujuan yang ditetapkan.

Tindakan-tindakan tersebut merupakan upaya-upaya untuk menimbulkan dampak nyata bagi masyarakat. Fokus tidakan kebijakan implementasi sitem

⁶² Bintoro Fenty Ratih, “Presepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda”, (Jurnal Riset Pembangunan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018).

⁶³ Edi purwanto “Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Di Islamic International School SD Plus Darul Ilmi Murni Namorambe” Namorambe-SUMUT, Tesis, UINSU.

zonasi sebenarnya adalah perbaikan pendidikan diantaranya mutu pendidikan dan efek yang didapat setelah pemberlakuan program tersebut.

Setidaknya untuk mengukur sejauh mana kebijakan implementasi suatu program tersebut dapat dilihat dari beberapa hal berikut.

TABEL I
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI

NO	VARIABEL	ASPEK	INDIKATOR
1	Kebijakan Implementasi	Komunikasi	<p>1. Panitia PPDB (penerimaan peserta didik baru) melakukan komunikasi yang mudah dipahami masyarakat ketika mensosialisasikan sistem PPDB (penerimaan peserta didik baru) berdasarkan sistem zonasi.</p> <p>2. Panitia PPDB (penerimaan peserta didik baru) mendapatkan persepsi yang positif ketika mensosialisasikan sistem PPDB (penerimaan peserta didik baru) berdasarkan sistem zonasi.</p>
			<p>3. Panitia PPDB (penerimaan peserta didik baru) tidak mendapatkan hambatan ataupun gangguan ketika mengadakan sosialisasi PPDB (penerimaan peserta didik baru) berdasarkan sistem zonasi</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	VARIABEL	ASPEK	INDIKATOR
2		Sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> Melalui kebijakan sistem zonasi dapat menghasilkan partisipan atau peserta didik yang baik (mempuni). Melalui pemberlakuan PPDB (penerimaan peserta didik baru) berdasarkan sistem zonasi dapat menghilangkan stigma sekolah pavorit. Kebijakan sistem radius zonasi dapat mempercrapat pelaksanaan pemerataan pendidikan. Kebijakan PPDB (penerimaan peserta didik baru) berdasar kan sistem zonasi dapat menunjang kualitas pendidikan di daerah-daerah.
3		Lingkungan kebijakan	Penerapan PPDB (penerimaan peserta didik baru) berdasarkan sistem radius zonasi dapat diberlakukan secara nasional.

NO	VARIABEL	ASPEK	INDIKATOR
4		Disposisi (sikap ataupun kecenderungan)	<p>1. Pelaksanaan PPDB (penerimaan peserta didik baru) berdasarkan sistem radius zonasi dapat diberlakukan secara Nasional dengan beberapa catatan.</p> <p>2. Pemberlakuan sistem PPDB (penerimaan peserta didik baru) berdasarkan radius zonasi sangat membantu bagi kemajuan pendidikan di Pekanbaru.</p> <p>3. Stekholder masyarakat khususnya calon peserta didik baru dapat menerima sistem PPDb (penerimaan peserta didik baru) berdasarkan radius zonasi.</p>
		Struktur birokrasi	Dengan kebijakan implementasi sistem radius zonasi dapat memangkas birokrasi yang ada.

Mutu atau kualitas pendidikan dapat diartikan sebagai suatu yang memuaskan dan melampaui keinginan ataupun kebutuhan pelanggan. Oleh

disebabkan demikian mutu dimaknai secara relative dan sangat berhubungan erat dengan kepuasan pelanggan. Pelanggan pendidikan ada dua aspek yaitu internal dan eksternal. Internal yakni Kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah, sedangkan pelanggan eksternal ada dua yaitu eksternal primer atau para siswa dan eksternal sekunder atau orang tua.

Dengan demikian untuk mengukur mutu atau kualitas pendidikan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu sebagai berikut.

TABEL II
MUTU PENDIDIKAN

NO	VARIABEL	ASPEK	INDIKATOR
1	Standar proses pendidikan	Silabus	<p>1. Guru menyiapkan kondisi psikis dan fisik sebelum memulai pembelajaran</p> <p>2. guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari</p> <p>3. guru menjelaskan tujuan pembelajaran</p> <p>4. Guru memberikan materi pembelajaran yang memuat fakta, konsep dan prinsip sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi Siswa mempunyai hasil ujian yang sangat baik.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	VARIABEL	ASPEK	INDIKATOR
5.			Guru menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik
			Guru menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik
			Guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik
			Guru menggunakan sumber belajar yang sesuai dengan karakter peserta didik
			Guru menjelaskan materi secara logis dan sistematis
6.		RPP	Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya
			Guru melakukan penilaian hasil belajar
7.			Guru melakukan tindak lanjut pemberian tugas individu atau kelompok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	VARIABEL	ASPEK	INDIKATOR
			3. Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, instrumen, sumber data dan temuan awal tentang penelitian ini.

A. Jenis dan Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dikarenakan peneliti akan memperoleh data melalui wawancara. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pertama-tama membaca kembali keseluruhan teks yang ada sambil meringkas dan menghilangkan duplikasi- duplikasi. Dilanjutkan dengan membuat peng-kode-an (coding) atau klasifikasi. Hasil koding ini akan menelorkan pola-pola umum atau tema-tema.⁶⁴

Kemudian peneliti akan melakukan tiga tahapan untuk menganalisis data yang telah penulis dapatkan. Pertama peneliti akan menafsirkan teks yang disampaikan oleh partisipan. Kedua peneliti menyusun kembali hasil penafsiran tingkat pertama dan mendapatkan tema- temanya. Dan yang ketiga yaitu peneliti menghubungkan tema-tema tersebut sehingga membentuk teori, gagasan dan pemikiran baru.

Sehingga peneliti mengetahui tujuan implemetasi kebijakan sistem radius zonasi di sekolah yang dirumuskan pemerintah pada dinas pendidikan dan dampak

⁶⁴ J. R. Raco : *METODE PENELITIAN KUALITATIF*, (Jakarta, 2010), h 65.

yang dihasilkannya terhadap mutu pendidikan, dan juga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dalam hal ini wali siswa.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif sedangkan kondisi nyata di lapangan diangkat berdasarkan hasil studi kasus (Case Study)-kualitatif sedangkan penyajiannya digunakan studi deskriptif-analitik.

Dengan pertimbangan tersebut penelitian ini berusaha mendeskripsikan data, fakta dan keadaan atau kecenderungan yang terjadi serta melakukan analisis dan prediksi tentang apa yang sebaiknya dilakukan untuk mencapai keadaan yang diinginkan di waktu yang akan datang.

Desain studi kasus juga dapat untuk menghimpun dan menganalisis data berkenaan dengan sesuatu kasus. Sesuatu dijadikan kasus biasanya karena ada masalah, kesulitan, hambatan, penyimpangan, tetapi bisa juga sesuatu dijadikan kasus meskipun tidak ada masalah, malahan dijadikan kasus karena keunggulan atau keberhasilannya.⁶⁵

Dengan desain penelitian ini diharapkan menangkap kompleksitas kasus tersebut. Kasus itu haruslah tunggal dan khusus. Studi ini dilakukan karena kasus tersebut begitu unik, penting dan bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Dengan memahami kasus itu secara mendalam maka peneliti akan menangkap arti penting bagi kepentingan masyarakat, organisasi atau komunitas

⁶⁵ Hardani, Metode Penelitian Kualitatif & kuantatif, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu. 2020, h, 64

tertentu. Pemahaman kasus unik itu akan memberikan masukan yang berguna bagi kelompok dan organisasi lain mengatasi masalah yang dihadapi.

Dengan demikian dimungkinkan dapat digambarkan kondisi faktual dalam penyelenggaraan program sekolah yang menyelenggarakan sistem PPDB berdasarkan radius zonasi, yaitu kondisi objektif dan kondisi subjektif. Kondisi objektif, adalah peraturan-peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan kebijakan pemberlakuan sistem radius zonasi.

Sedangkan kondisi subjektif, adalah berkaitan dengan bagaimana kondisi objektif tersebut mendapat respon dari stake-holders pendidikan, yaitu : Kepala dinas dan kepala sekolah sebagai pengemban amanah yang menjalankan pendidikan, kedua, masyarakat selaku pelaku/peserta atau kelompok sasaran program sekolah yang menerapkan sistem radius zonasi, serta partisipasinya dalam implementasi kebijakan tersebut.

Untuk selanjutnya, dengan mempertimbangkan dan menganalisis kedua kondisi tersebut, yaitu kondisi objektif dan kondisi subjektif dalam implementasi kebijakan sekolah yang menerapkan sistem PPDB melalui sistem radius zonai, dapat diidentifikasi beberapa hal yang akan memberi arah kepada fokus masalah penelitian.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi Subjek penelitian ialah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Di tingkat Kecamatan yaitu wilayah Bukit Raya Kota Pekanbaru, dalam hal ini sebagai lokasi penelitian, maka sumber data dan informan yang dipilih adalah Kepala Sekolah selaku perpanjangan tangan dari dinas pendidikan dalam rangka menjalankan kegiatan pendidikan, serta ketua PPDB (Panitia Penerimaan Murid Baru) selaku pelaksana yang mengimplementasikan amanat UUD dan amanat kepala sekolah yaitu Ibuk Nur Haida S.Pd , M.M dan selaku ketua PPDB (Penerimaan peserta didik baru) sekaligus Wakasis (Wakil kesiswaan) Bapak Dasrial S.Pd. Dalam hal ini untuk menjaga kode etik penulisan maka penulis melakukan pengkodean yaitu: kepala sekolah dengan nomor kode 1 (satu) dan ketu PPDB (Penerimaan sisiwa baru) dengan nomor kode 2 (dua).
2. Wali siswa/siswi yang dalam hal ini akan diwakili oleh ketua komite sekolah karena memiliki loyalitas, komitmen serta peduli terhadap pendidikan yaitu Bapak A. Fauzi. Dalam hal ini penulis akan memberikan kepada ketua komite dengan nomor kode 3 (tiga).
3. Pada tingka masyarakat akan di wakili RT dan RW selaku pengguna instansi, lulusan dan pemangku wilayah di Kecamatan Bukit Raya, yaitu RT selaku Bapak Sadikin dan RW selaku Bapak Arfanda. RT akan penulis berikan nomor kode 4 (empat) dan RW dengan nomor kode 5 (lima)

Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah kebijakan implementasi sistem PPDB berdasarkan radius zonasi dan mutu pendidika si SMAN 14 Kota Pekanbaru.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2020 sampai 23 Desember 2020 Penelitian ini bertempat di Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Kota Pekanbaru, yang terletak di jl. T. Bey Sei Mintan. Kecamatan Simpang Tiga Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini ditentukan dengan sengaja dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti pada observasi awal, terjadi beberapa permasalahan setelah pemberlakuan PPDB melalui system Radius Zonasi.
2. Sesuai dengan UUD pada pasal 31 ayat 1 disebutkan” setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”dengan demikian peneliti beranggapan bahwa konsep tersebut, sesuai dengan konsep penelitian yang akan dilaksanakan.
3. Adanya keterbukaan dari pihak sekolah terutama panitia PPDB terhadap penelitian yang akan dilaksanakan.
4. Peneliti merupakan warga tempatan, sebagai warga tempatan tentunya menginginkan pendidikan di sekitarnya lebih maju dan bermutu.
5. Selain itu SMA Negeri 14 Pekanbaru juga merupakan sekolah yang memiliki budaya belajar yang sangat bagus. dengan adanya kebijakan zonasi ini sekolah harus tetap berusaha mempertahankan budaya belajarnya dan bagaimana sekolah dapat memberikan pengaruh budaya belajar ini kepada murid yang berasal dari zonasi ini. Dengan adanya kebijakan ini pemerintah

mengharapkan pemerataan pendidikan dan tidak ada lagi sekolah favorit. Bahwa disetiap sekolah hendaknya siswa memiliki kesempatan yang sama. Namun, dari adanya penerapan kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai masyarakat. Untuk itu disini peneliti akan mencoba untuk menggali pendapat dari para stakeholder sekolah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi pengamatan, interview (wawancara) mendalam,⁶⁶ peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi lapangan.⁶⁷

1. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati tingkah laku masyarakat disana. Selain itu, peneliti juga mengamati bagaimana kerjasama antar guru yang ada di lapangan. Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi lapangan. Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk pengamatan secara langsung agar mendapatkan data berkaitan dengan sistem zonasi dan mutu pendidikan.

2. Wawancara

Disini peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar penelitian yang dilakukan kepada nara sumber. Pertanyaan yang diajukanpun semi terstruktur dan bersifat terbuka untuk memunculkan pandangan dan opini dari

⁶⁶ Kuntjojo, *Metode Penelitian*, (Kediri: Universitas Nusantara, 2019), hlm. 16.

⁶⁷ Sumardi Soeryabrata, *Metode Penelitian*, (Depok: PT. Grafindo Persada, 2018), hlm.

partisipan yang tentunya sangat beragam. Dengan wawancara semi terstruktur peneliti mencoba menggali informasi yang lebih dalam tentang kehidupan informan untuk mengetahui bagaimana cara berfikir mereka. Dengan metode wawancara semi terstruktur ini juga diharapkan mendapatkan jawaban yang lebih mendalam sehingga dapat menggali informasi yang lebih lanjut.

Wawancara atau interview sebagaimana yang diungkapkan Andi Prastowo dalam bukunya “Metode interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dan orang yang diwawancarai berdasarkan tujuan penelitian.”⁶⁸

3. Dokumentasi

Penggunaan metode ini peneliti maksudkan untuk mencari data mengenai dokumen-dokumen, foto, buku, maupun tulisan lainnya. Dari metode ini data yang didapatkan adalah Permendikbud No. 17 Tahun 2017, data peserta PPDB yang telah ada, data panitia, data infentaris sekolah, SOP kebijakan sistem zonasi, juklak dan juknis kebijakan sistem zonasi.

Metode dokumentasi dalam pengertiannya yang lebih luas dapat berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.⁶⁹

E. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h 225.

⁶⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 147.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitatif murni analisis kualitatif yaitu analisis deskriptif kualitatif dimaksudkan sebagai penelitian yang memuat jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini agar dapat mengungkap fakta, fenomena, variable, keadaan sehingga keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dengan semestinya serta mengungkap realita yang terjadi.

Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan mengutarakan data yang bersangkutan sesuai dengan realita yang terjadi, sikap serta pespsi masyarakat, pertentangan 2 hal/lebih, hubungan antar variable, perbedaan antara fakta, pengaruh terhadap kondisi, dan lain-lain. Sehingga masalah yang akan diteliti serta diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif mengarah pada studi kuantitatif, studi komparatif, serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional satu unsur bersama unsur lainnya. Berjalanya penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, menginterpretasi data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang membentuk pada penganalisisan data tersebut.

Dalam metode penelitian kualitatif, Analisis data adalah “Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Milles dan Huberman yang disebut sebagai model interaktif yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga hal utama ataupun tiga langkah.

Adapun langkah-langkah dalam mengumpulkan data kualitatif dalam

adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti melakukan pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data dari catatan lapangan untuk menggolongkan dan menyusunnya menjadi lebih sistematis. Memilih hal-hal yang penting untuk ditonjolkan. Memisahkan data dan mengelompokkannya serta transformasi data dasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.

2. Penyajian Data.

Pada tahap ini penyusunan data dari yang bersifat kompleks ke bentuk yang sistematis sehingga dapat dipahami dengan mudah. Sehingga membantu peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Adapun jenis dan bentuk penyajiannya adalah berupa matriks, grafik, jaringan, bagan dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini setelah peneliti melakukan reduksi data maka langkah selanjutnya peneliti akan melakukan penyajian data. Dari data yang sudah dikelompokkan maka akan diuraikan dan dibentuk bagan agar mudah dipahami.

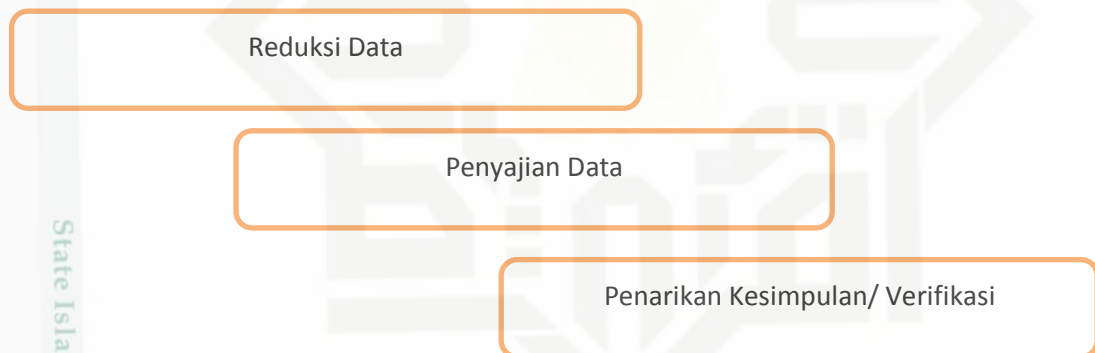
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti mulai menarik kesimpulan adalah langkah yang terakhir dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data dengan terus menerus, baik pada saat pengumpulan data. Pada awalnya kesimpulan bisa dibuat longgar dan terbuka kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar pada pokok

temuan.

Pada penarikan kesimpulan ini peneliti berusaha untuk mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat dan proporsi. Jadi dari data yang diperoleh penelitian sejak mulanya mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan tersebut senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung, verifikasi dapat singkat dengan mencari data baru.

Jadi analisis data ini dilaksanakan dimulai dari terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang kemudian disusun secara sistematis agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan tujuan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis bab demi bab yang telah penulis lakukan, mengenai kebijakan implementasi sistem zonasi terhadap mutu pendidikan di SMA 14 kecamatan Bukit Raya kota pekanbaru yakni sebagai berikut.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan cara pengambilan data melalui observasi dan wawancara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Implementasi sistem zonasi di SMA 14 Kel. Simpang tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat diketahui pelaksanaan kebijakan implementasi sistem zonasi di SMA 14 sudah berjalan dengan baik, sekolah sudah melakukan langkah-langkah yang mestinya dilakukan seperti sudah mengadakan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat dan lain-lain.

2. Mutu Pendidikan

Setelah diberlakukannya sistem PPDB (penerimaan peserta didik baru) berdasarkan sistem radius zonasi di SMA 14 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, bahwa terjadi penurunan mutu pendidikan dan harus secepatnya diadakan perbaikan demi perbaikan agar mutu pendidikan di Indonesia kedepannya lebih baik khususnya di SMA 14 Kota Pekanbaru.

Hal ini dapat diukur dari beberapa aspek yang dapat mengukur mutu atau kualitas pendidikan, yaitu; nilai-nilai moral, hasil ujian, dukungan orang tua, sumber daya manusia, penggunaan teknologi, mempunyai visi dan misi, dan kepedulian sekolah terhadap siswa.

Dari beberapa hal yang demikian, terjadi banyak persoalan yang dihadapkan kepada guru seperti, tidak tercapainya kurikulum pembelajaran, terjadinya penurunan prestasi akademik dan non akademik siswa, menurunnya daya saing siswa, terjadinya pelanggaran disiplin, menurunnya keterampilan siswa, sikap tidak peduli yang ditunjukkan siswa, tidak optimalnya penggunaan sarana prasarana, kurangnya minat dan motivasi belajar siswa, dan lain-lain.

B. Saran-saran

Setelah diadakan penelitian terhadap kebijakan implementasi sistem zonasi terhadap mutu pendidikan di SMA 14 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, maka demi perbaikan mutu pendidikan serta perbaikan sekolah, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Dinas Pendidikan

Dinas pendidikan dalam hal ini harus melakukan kajian-kajian yang sifatnya mengukur mutu pendidikan setelah pemberlakuan sistem zonasi supaya terjadi perbaikan demi perbaikan pendidikan khususnya di Kota Pekanbaru, agar tercipta pendidikan yang bermutu sesuai standar pendidikan nasional.

2. Untuk sekolah SMA 14 Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekolah harus melakukan langkah-langkah dan konsep-konsep yang terukur supaya dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan kedepannya.

3. Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat ditindak lanjuti, karena dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan mutu pendidikan setelah diberlakukan sistem PPDB (Penerimaan peserta didik baru) berdasarkan sistem radius zonasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008.

Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Jakarta:,Rajawali Press, 2010.

Arifin, *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggara*, ENERBIT PT.PUSTAKA INDONESIA PRESS, 2011.

B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Bintoro Fenty Ratih, "Presepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda", (Jurnal Riset Pembangunan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018).

Dani Vardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Cet. II, Jakarta: PT Indeks, 2008.

Dedy Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, Bandung, PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015.

Depag , *RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Konsep Dasar*, Jakarta: Ditjend Pendidikan Dasar dan Menengah, 2012.

Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Edi purwanto "Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Di Islamic International School SD Plus Darul Ilmi Murni Namorambe" Namorambe-SUMUT, Tesis, UINSU.

Edward Sallis, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*, Jokjakarta, IRCiSoD, 2011.

Edward Sallis, *Total Quality Managemen In Education*, (IRCiSoD, 2012.

EVALUASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN (Studi pada Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Kota Malang).

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Izin Usaha Toko Modern Minimarket Waralaba/Cabang di Kecamatan Depok terkait Perda Kab.Sleman No.18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Fandi Tjoptono, dkk, *Total Quality Management*. Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2003.

Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & kuantatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu. 2020.

<http://riaupos.co/203497-berita-pemda-dinilai-tak-siap-sistem-zonasi.html>,
(11/10/2019)

<https://edukasi.kompas.com/read/2018/10/15/18530531/tenyata-ini-3-tujuan-zonasi-selain-untuk-ppdb>. (16/03/2020).

J. R. Raco : *METODE PENELITIAN KUALITATIF*, Jakarta, 2010.

Jhon Fresly Hutahayan, *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik*, Jakarta: CV. BUDI UTAMA, 2019.

John M. Echolis, Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 1988.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 2, Nomor 2: 389-405 Mei 2017
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP.

Jurnal Ilmiah Pendidikan ISSN : 2252 - 4975 Vol. I No. 1 Edisi Maret-Agustus 2012.

JURNAL ACADEMICA Fisip Untad VOL.06 No. 01 Februari 2014

Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN.

Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik Volume 3 Number 1 Juni 2017 pISSN: 2460-6162 | eISSN: 2527-6476.

Jurnal As-Salam Vol.1(1). 2016:62-72 Suwarno.

Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, Vol. 1, No. 02, 2017. Muhammad Fadhli. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe. fadhlikhan88@gmail.com.

Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan. *Penelitian Pendidikan Matematika*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2015.

Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan., *Penelitian Pendidikan Matematika*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2015.

Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dr. Arifin Tahir,Msi.

Khawdomi Eka, Skripsi : “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah”, Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2019.

Kuntjojo, *Metode Penelitian*, Kediri, 2019.

Lim Walisman, *Kebijakan pendidikan dari filosofi ke implementasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

M. Irfan, Islamy.1192.Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara.Jakarta: Bumi Aksara.Hlm 102

M.N. Nasution, *Manajemen Mutu terpadu*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Bandung : Al-Ma'arif, 1984.

Maria Angelia Silalahi, dkk, *TUGAS DAN WEWENANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019).*

Merile S. Grindle, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo , 200.

Muhammad Idrus, “*Mutu Pendidikan Dan Pemerataan Pendidikan Di Daerah*”, , PSIKOPEDAGOGIA Edisi 2, Desember 2012.



Muhammad Idrus, *PSIKOPEDAGOGIA, Mutu Pendidikan dan Pemerataan Pendidikan di Daerah Quality Of Educational Equality*, Vol. 1, No. 2, Desember 2012 ISSN: 2301-6167

Muhammad Utsman el-Muhammady, *Pemurnian Tasawuf oleh Imam Al Ghazali*, [www/Scribd.com/doc/2917072/](http://www.Scribd.com/doc/2917072/) tgl. 16 Oktober 2020.

Nana Sudjana, *Dasar-dasar Peroses belajar mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algensinsindo, 2013

Nasution. *Manajemen Mutu Terpadu (total Quality management)*, Jakarta : Ghalia Indonesia. 2001.

Nur Azman, *Kamus Standar Bahasa Indonesia*, Bandung: Fokusmedia, 2013.

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung: CV Sinar Baru h, 2002.

Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi* Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003.

Oemar Hamalik, *Evaluasi Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018

Permendiknas No. 63 H, 4, TH 2009.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999.

Ravik Karsidi, *Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan Teknologi Belajar Jarak Jauh*, Makalah Disampaikan dalam Seminar Regional Unit Pelaksana Belajar Jarak Jauh –Universitas Terbuka, Solo: 28 Mei 2005.

Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi*, Bandung: CV. Pustaka, 2015.

Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

- Saul Purwoyo, 8 *Prinsip-Prinsip Manajemen Mutu*, diakses dari saulpurwoyo.tripod.com/id1.html, pada tanggal 17 November 2019 pukul 19.30 WIB.
- Subagio Atmodiwirio, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Ardadizya Jaya, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sumardi Soeryabrata *Metode Penelitian*, Depok: PT. Grafindo Persada, 2018.
- Sumardi Soeryabrata, *Metode Penelitian*, Depok: PT. Grafindo Persada, 2018.
- Suyahman, *SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN UNS & ISPI JAWA TENGAH 2015, PENDIDIKAN UNTUK SEMUA ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN* (Studi Kasus Permasalahan Pendidikan di Indonesia), Surakarta, 21 November 2015 ISBN: 978-979-3456-52-2Sri.
- Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan Indonesia Memasuki Millenium III*, Yogyakarta: Adi Cita, 2000.
- Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan Konsep, Strategi, dan Aplikasi*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Syaiful Syagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Tachjan, *Implementasi kebijakan Publik*, Bandung: TRUENORTH, 2006.
- Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik*, Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014
- Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undanng-Undang Sisdiknas 2003*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- TU SMA 14, Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kot. Pekanbaru 12 februari 2020.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
- W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:PT. GRASINDO. 2002, h 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi (Ketua komite SMA 14 Pekanbaru), Tgl, 15 Desember 2020, di kediaman beliau Jl. T. Bey Ujung..

Wawancara dengan Bapak Arfanda (Ketua RW lingkungan SMA 14 Pekanbaru), Tgl, 17 Desember 2020, di rumah, JL. T. Bey .

Wawancara dengan Bapak Dasrial S.Pd. (Ketua panitia PPDB dan Wakil Kesiswaan SMA 14 Pekanbaru), Tgl, 14 Desember 2020, di SMA 14 Pekanbaru.

Wawancara dengan Bapak Sadikin (Ketua RT lingkungan SMA 14 Pekanbaru), Tgl, 18 Desember 2020, di rumah, JL. T. Bey

Wawancara dengan Ibu Aslindawati S.Pd. MM (Kepala Sekolah SMA 14 Pekanbaru), Tgl, 14 Desember 2020, di SMA 14 Pekanbaru.

Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Winarsih, *Jurnal Kependidikan, KINERJA PENDIDIKAN MENENGAH DI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN* Vol. II No. 2 November 2014.

Yulianto, *Formulasi dan implelementasi kebijakan publik*, Universitas Gorontalo Pers, 2015.



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Nomor : 541/Un.04/Ps/PP.00.9/2020 Pekanbaru, 27 Agustus 2020
Lamp. : 1 berkas
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada
Yth. Gubernur Riau
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Riau
Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAR NASUTION
NIM	: 21890115450
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2020
Judul Tesis/Disertasi	: ANALISIS KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM ZONASI TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH KEC. BUKIT RAYA (SMAN 14 KEL. SIMPANG TIGA KEC. BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU).

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari KEL. SIMPANG TIGA KEC. BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU

Waktu Penelitian: 3 Bulan (25 Agustus 2020 s.d 25 Februari 2021)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam
Direktur,

Prof. Dr. Afrizal. M, MA
NIP. 19591015 198903 1 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحربية

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Muhammad Nasution
ID Number : 21890115450
Date of Birth : June 23, 1995
Sex : Male
Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension : 53

Structure & Written Expressions : 55

Reading Comprehension : 50

Overall Score : 527

Expired Date : February 17, 2022



English Proficiency Test Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
HP: 0852 7144 0823 Fax: (0761) 838832
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



The Head of Language Development Center
Mahyudin Syukri, M. Ag
NIP. 19720421 200604 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

مرکز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU



شهادة الكفاءة اللغوية

اعطيت الى

Muhammar Nasution

رقم القيد :	21890115450
الجنس :	Male
المولود :	June 23, 1995

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع :	55
القواعد :	46
القراءة :	51
النتيجة :	507

مستعملة حتى : February 17, 2022

رئيس مركز ترقية اللغة
محى الدين شكوى الجابري





Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP: 0852 7144 0823
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor	Keterangan
1.	10/10/2020	Perbaikan Rumusan Masalah		
2.	25/10/2020	Penambahan Materi i / Teori		
3.	22/10/2020	Perbaikan Bab III		
4.	10/11/2020	Terjun Kelapangan (Turun) Kelapangan		
5.	10/1/2021	1. Penambahan materi 2. Perbaikan Promotor 3. Metode Penelitian 4. Perbaikan Penulisan		
6.		Ace		

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 13 Maret 2021

Pembimbing I / Co Promotor *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	16/10/2020	Revisi		
2.	16/10/2020	Revisi		
3.	25/10/2020	Revisi		
4.	20/11/2020	Revisi		
5.	4/1/2021	Revisi		
6.	11/1/2021	Ace		

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 28 Januari 2021

Pembimbing I / Promotor *



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

Muhammad Alastan

NIM

21890115450

PROGRAM STUDI

PASCASARJANA

KONSENTRASI

PAI

PENBIMBING I / PROMOTOR

Dr. Zamriswarya

PENBIMBING II / CO PROMOTOR

Dr. Alunzar

JUDUL TESIS/DISERTASI

Analisis kebijakan

implementasi sistem

zaman terhadap mutu pen-

didikan di sekolah kec.

Buket Raya Kot. P. Baru

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/36185
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : 541/Un.04/PS/PP.00.9/2020 Tanggal 27 Agustus 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

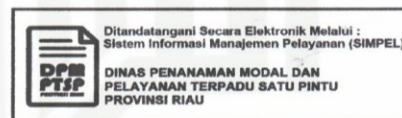
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : MUHAMMAR NASUTION |
| 2. NIM / KTP | : 21890115450 |
| 3. Program Studi | : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 4. Konsentrasi | : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 5. Jenjang | : S2 |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM ZONASI TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH KEC. BUKIT RAYA (SMAN 14 KEL. SIMPANG TIGA KEC. BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU). |
| 7. Lokasi Penelitian | : SMAN 14 KEL. SIMPANG TIGA KEC. BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU). |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 4 November 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENDIDIKAN

JALAN CUT NYAK DIEN NO. 3 TELP. 22552/21553
PEKANBARU

Pekanbaru, 09 NOV 2020

No : 071/Disdik/1.3/2020/ 10375
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Izin Riset / Penelitian

Kepada
Yth. Kepala SMAN 14 Kota Pekanbaru

di-
Pekanbaru

Berkenaan dengan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/36185 Tanggal 4 November 2020 Perihal Pelaksanaan Izin Riset, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : MUHAMMAR NASUTION
NIM : 21890115450
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Jenjang : S2
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : ANALISIS KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM ZONASI TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH KEC.BUKIT RAYA (SMAN 14 KEL. SIMPANG TIGA KEC.BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU).

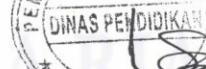
Lokasi Penelitian : SMAN 14 KEL. SIMPANG TIGA KEC. BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk dapat memberikan yang bersangkutan berbagai informasi dan data yang diperlukan untuk penelitian.
2. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dan memaksakan kehendak yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
3. Adapun Surat Izin Penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU
SEKRETARIS



Dr. Eng. YUSRI, S.Pd., S.T., M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19661231 199102 1 007

Tembusan:
Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 14 PEKANBARU**

Alamat : Jl. Sei. Mintan I Pekanbaru
Email : sman14pekanbaru@gmail.com
NSS : 30.1.09.60.06.052

Kode Pos : 28284
Telp/Fax : (0761) 674777
NPSN : 10.49.52.26
Akreditasi : A

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3/TU.1/SMAN.14/2021/240

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SMA Negeri 14 Pekanbaru, Provinsi Riau dengan ini menerangkan bahwa;

Nama : MUHAMMAR NASUTION
N I M : 21890115450
Mahasiswa : S2 Universitas Islam Negeri Suska Riau
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Telah mengadakan Riset/Penelitian di SMA Negeri 14 Pekanbaru, pada tanggal 19 – 22 November 2021. Dan hasil dari Riset/Penelitian tersebut akan digunakan sebagai Bahan penyusunan Tesis dengan judul ;

"ANALISIS KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM ZONASI TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH KEC. BUKIT RAYA (SMAN 14 KEL. SIMPANG TIGA KEC. BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 01 April 2021

Kepala Sekolah,

ASLINDAWATI, S. Pd., MM
NIP. 197206112006042007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WAWANCARA (INTERVIEW)
ANALISIS KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM ZONASI
TERHADAP MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH (SMAN 14 KEL.
SIMPANG TIGA KEC. BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU).

NAMA : MUHAMMAR NASUTION

FAKULTAS : PASCASARJANA

A. KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM ZONASI

1. Bagaimana Panitia PPDB (penerimaan peserta didik baru) melakukan komunikasi yang mudah dipahami masyarakat ketika mensosialisasi sistem PPDB (penerimaan peserta didik baru) berdasarkan sistem zonasi. ?
2. Apakah Panitia PPDB (penerimaan peserta didik baru) mendapatkan persepsi yang positif ketika mensosialisasikan sistem PPDB (penerimaan peserta didik baru) berdasarkan sistem zonasi. ?
3. Apakah Panitia PPDB (penerimaan peserta didik baru) tidak mendapatkan hambatan ataupun gangguan ketika mengadakan sosialisasi PPDB (penerimaan peserta didik baru) berdasarkan sistem zonasi. ?
4. Bagaimana kebijakan sistem zonasi dapat menghasilkan partisipan atau peserta didik yang baik (mempuni). ?
5. Apakah melalui pemberlakuan PPDB (penerimaan peserta didik baru) berdasarkan sistem zonasi dapat menghilangkan stigma sekolah pavorit. ?
6. Apakah dengan kebijakan sistem radius zonasi dapat mempercepat pelaksanaan pemerataan pendidikan. ?
7. Apakah Kebijakan PPDB (penerimaan peserta didik baru) berdasarkan sistem zonasi dapat menunjang kualitas pendidikan di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah-daerah.?

8. Bagaimana penerapan PPDB (penerimaan peserta didik baru) berdasarkan sistem radius zonasi dapat diberlakukan secara nasional.?

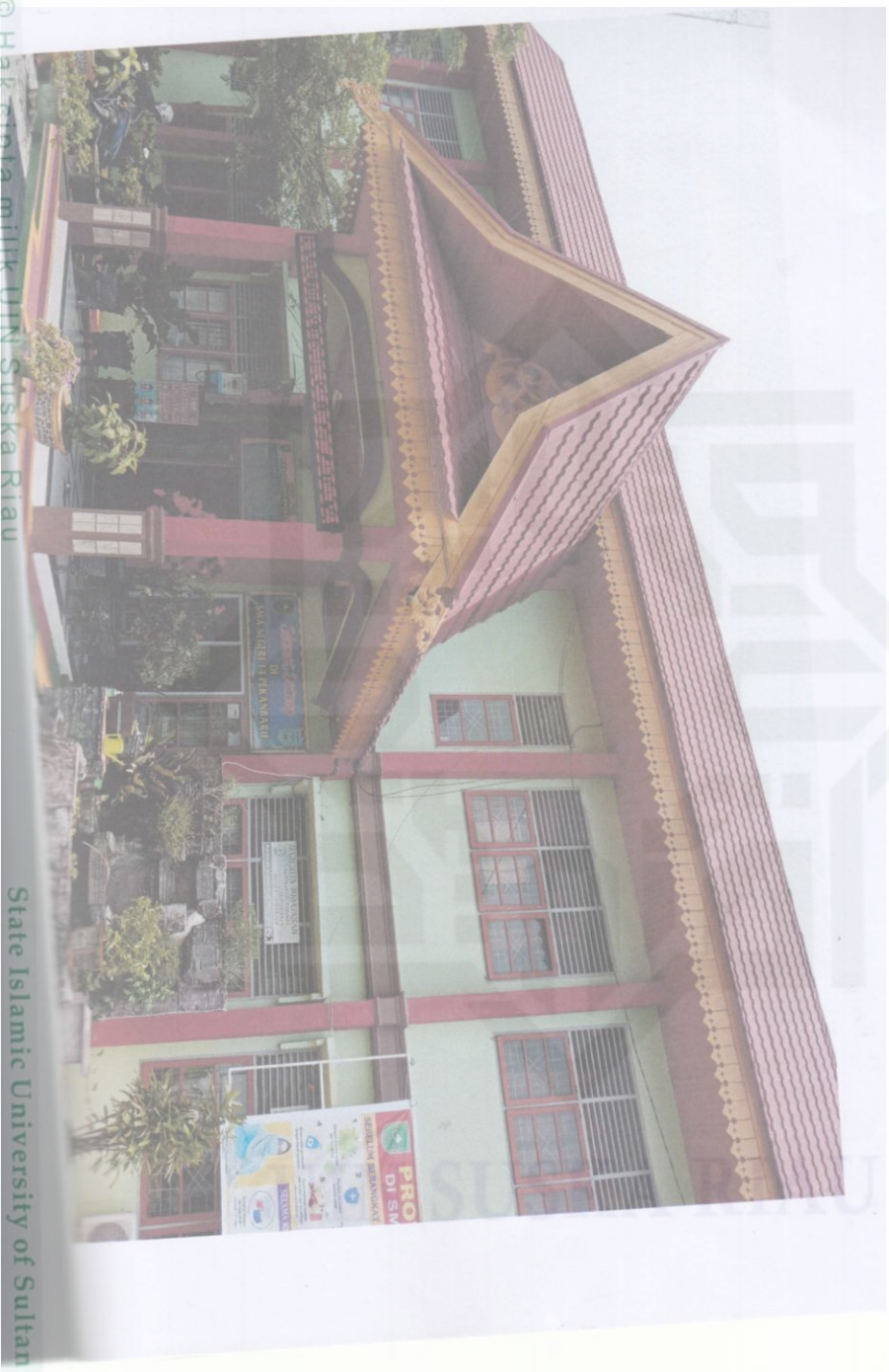
B. MUTU PENDIDIKAN

1. Apakah siswa mampu menunjukkan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai moral yang ada.?
2. Apakah siswa mempunyai hasil ujian yang sangat baik. ?
3. Apakah Orang tua mampu bertindak sebagai pembimbing dan penengah dalam proses pemecahan masalah.?
4. Apakah Orang tua mampu bertindak sebagai validator diantaranya memberikan support (dukungan), perhatian, dan penghargaan.?
5. Apakah Siswa mampu bersaing secara global.?
6. Apakah Siswa mampu bersaing dalam produktivitas kerja.?
7. Bagaimana sekolah mampu menerapkan misi agar tercapai tujuan visi sekolah.?
8. Bagaimana kepedulian dan perhatian sekolah siswa yang berprestasi maupun yang tidak berprestasi.?
9. Apakah Sekolah mempunyai kurikulum yang seimbang dan relevan dengan perkembangan pendidikan saat ini.?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Bersama wakil kepala sekolah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Bersama Pak RW



Bersama Pak RT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TAMPAK HALAMAN DEPAN SMA 14



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Halaman Sebelah Kiri



Parkiran

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU